LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

TAHUN 2019

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126

PENGADILAN TINGGI BANTEN
DHARMMAYUKTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Banten dapat kami sajikan.

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019.

Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dalam mengemban tugas sesuai arahan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai instansi vertikal di atasnya.

Jajaran Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat memberikan pelayanan prima. Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan publik, diantaranya berbagai aplikasi yang menjadi unggulan utama Mahkamah Agung yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Siwas, E-court dan E-litigasi.

Dalam menjamin pelaksanaan operasional yang transparan dan akuntabel pun, Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya berusaha mempertahankan dan meningkatkan perannya melalui program akreditasi penjaminan mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembangunan Zona Integritas dan langkah-langkah menuju pencapaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Salah satu hasil yang dapat dicapai pada tahun ini adalah diperolehnya penganugerahan zona integritas menuju WBK untuk Pengadilan Negeri Tangerang.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten atas segala dedikasi dan partisipasi aktifnya. Semoga hasil kerja keras ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 20 Januari 2020
Ketua,

PENGADILAN TINGGI BANTEN

HARYANTO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab I Pendahuluan 1
Bab II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 3
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 3
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 3
B. Penyelesaian Perkara 4
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus 4
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu 5
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 6
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi 6
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi 7
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 7
1. Posbakum 7
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu 8
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 8
Bab III Sumber Daya Manusia 10
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan 10
1. Mutasi 11
2. Promosi 12
3. Pensiun 13
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis) 14
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana, dan Teknologi Informasi. 17
A. Pengelolaan Keuangan 17
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 22
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 30
1. Implementasi *E-court* di Lingkungan Peradilan Umum 31
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum 34
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik 35
1. Akreditasi Penjaminan Mutu 35
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 38
3. Inovasi Pelayanan Publik 42
Bab VI Pengawasan 48
A. Internal 48
B. Evaluasi 52
Bab VII Penutup 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 54

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :143/KMA/SK/VIII/ 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor: 1730/ SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya karena Pengadilan Tinggi Banten selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap pengadilan tingkat pertama di bawahnya.

Administrasi Pengadilan Tinggi Banten dibebankan menurut teknis dan non teknis yang dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Sehingga kegiatan itu bisa terlaksana efisien dan efektif.

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : "MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN".

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;

Selama kurun waktu 2019, Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Beberapa aplikasi yang telah diterapkan dan selalu berusaha untuk ditingkatkan kinerjanya yaitu :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), saat ini menggunakan SIPP versi 3.2.0
- Siwas (Aplikasi Pengawasan) versi 3.0.0 yang bermanfaat bagi pencari keadilan jika menemukan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri di bawahnya, maka dapat melaporkan melalui aplikasi ini.
- E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang

dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- E-litigasi yang baru dilaunching pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan HUT Mahkamah Agung R.I. Dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Selanjutnya, masih dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Banten juga tetap kosisten dan senantiasa meningkatkan kinerja melalui program-program sebagai berikut :

- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. Pedoman standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018.
- Akreditasi Penjaminan Mutu yang merupakan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya telah memperoleh akreditasi A dari Direjn Badilum.
- Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM, dalam rangka pencegahan korupsi, penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan predikat ini, terbukti dengan diperolehnya penganugerahan zona integritas menuju WBK untuk Pengadilan Negeri Tangerang.

BAB II
PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

Keadaan perkara di tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

SATKER	PERKARA		SISA THN 2018	MASUK THN 2019	PUTUS THN 2019	SISA THN 2019	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TH.2019
PT Banten	Pidana	Biasa	10	115	114	11	91%
		Anak	-	6	5	1	83%
		Tipikor	1	7	8	-	100%
	Perdata	Perdata	28	164	171	21	89%
PN Tangerang	Pidana	Biasa	689	2.577	2.526	740	77%
		Cepat	-	150.229	150.229	-	100%
		Anak	15	63	66	12	85%
		Pra Peradilan	-	18	18	0	100%
	Perdata	Gugatan	538	1.236	1.238	536	70%
		Permohonan	144	1.224	1.265	103	92%
		Gugatan Sederhana	24	46	53	17	76%
		Perlawanan/Bantahan	4	22	11	15	42%
PN Serang	Pidana	Biasa	238	934	920	252	78%
		Cepat	-	15	15	0	100%
		Anak	1	37	37	1	97%
		Pra Peradilan	-	11	10	1	91%
		Tipikor	7	27	25	9	74%
	Perdata	Gugatan	54	147	152	49	76%
		Permohonan	10	246	237	19	93%
		Gugatan Sederhana	10	29	34	5	87%
		Perlawanan/Bantahan	-	2	1	1	50%
		PHI	33	139	135	37	78%
PN Pande-glang	Pidana	Biasa	43	256	264	35	88%
		Cepat	-	13	13	-	100%
		Anak	-	4	4	-	100%
		Pra Peradilan	1	-	1	-	100%
	Perdata	Gugatan	10	30	33	7	83%
		Permohonan	1	16	17	-	100%
		Gugatan Sederhana	-	27	27	-	100%
		Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-
PN Rang-kasbitung	Pidana	Biasa	25	173	168	32	85%
		Cepat	-	3	3	-	100%
		Anak	-	15	15	-	100%
		Pra Peradilan	-	-	-	-	-
	Perdata	Gugatan	5	17	20	2	91%
		Permohonan	2	104	104	1	98%
		Gugatan Sederhana	-	2	2	-	100%
		Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten di tahun 2019.

NO.	SATKER	PERKARA		SISA PERKARA TH.2018	SISA PERKARA TH.2019 YANG DIPUTUS PADA TH.2019	PERSEN-TASE PENYELE-SAIAN SISA PERKARA
1.	PT Banten	Pidana	Biasa	10	10	100%
			Anak	-	-	-
			Tipikor	1	1	100%
		Perdata	Perdata	28	28	100%
2.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	689	689	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	15	15	100%
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	538	538	100%
			Permohonan	144	144	100%
			Gugatan Sederhana	24	24	100%
			Perlawanan/Bantahan	4	4	100%
3.	PN Serang	Pidana	Biasa	238	238	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	1	1	100%
			Pra Peradilan	-	-	-
			Tipikor	7	7	100%
		Perdata	Gugatan	54	54	100%
			Permohonan	10	10	100%
			Gugatan Sederhana	10	10	100%
			Perlawanan/Bantahan	-	-	-
			PHI	33	33	100%
4.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	43	43	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
			Pra Peradilan	1	1	100%
		Perdata	Gugatan	10	10	100%
			Permohonan	1	1	100%
			Gugatan Sederhana	-	-	-
			Perlawanan/Bantahan	-	-	-
5.	PN Rangkasbitung	Pidana	Biasa	25	25	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	5	5	100%
			Permohonan	2	2	100%
			Gugatan Sederhana	-	-	-
			Perlawanan/Bantahan	-	-	-

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut ini rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2019.

NO.	SATKER	PERKARA		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2019	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAI-AN PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	PT Banten	Pidana	Biasa	114	114	-	100%
			Anak	5	5	-	100%
			Tipikor	8	8	-	100%
		Perdata	Perdata	171	171	-	100%
2.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	2.526	2.526	-	100%
			Cepat	150.229	150.229	-	100%
			Anak	66	66	-	100%
			Pra Peradilan	18	18	-	100%
		Perdata	Gugatan	1.238	981	257	79%
			Permohonan	1.265	1.264	1	99.9%
			Gugatan Sederhana	53	53	-	100%
			Perlawanan/ Bantahan	11	11	-	100%
3.	PN Serang	Pidana	Biasa	920	911	9	99%
			Cepat	15	15	-	100%
			Anak	37	37	-	100%
			Pra Peradilan	10	10	-	100%
			Tipikor	25	25	-	100%
		Perdata	Gugatan	152	136	16	89%
			Permohonan	237	235	2	99%
			Gugatan Sederhana	34	34	-	100%
			Perlawanan/ Bantahan	1	1	-	100%
			PHI	135	121	7	90%
4.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	264	259	5	98%
			Cepat	13	13	-	100%
			Anak	4	4	-	100%
			Pra Peradilan	1	1	-	100%
		Perdata	Gugatan	33	32	1	97%
			Permohonan	17	17	-	100%
			Gugatan Sederhana	27	27	-	100%
			Perlawanan/ Bantahan	-	-	-	-
5.	PN Rangkasbitung	Pidana	Biasa	166	166	-	100%
			Cepat	3	3	-	100%
			Anak	15	15	-	100%
			Pra Peradilan	-	-	-	-
		Perdata	Gugatan	20	12	8	60%
			Permohonan	104	104	-	100%
			Gugatan Sederhana	2	2	-	100%
			Perlawanan/ Bantahan	-	-	-	-

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2019.

NO.	SATKER	PERKARA		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2019	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2019 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2019 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2019 TIDAK MENGAJUKAN PK	
					JUM-LAH	PER SEN TASE	JUM-LAH	PER SEN TASE	JUM-LAH	PER SEN TASE
1.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	2.526	2.491	98,6%	2.520	99,8%	2.517	99,6%
			Anak	66	62	93,9%	62	93,9%	63	95,5%
		Perdata	Gugatan	1.238	1.021	82,5%	1.096	88,5%	1.163	93,9%
2.	PN Serang	Pidana	Biasa	920	890	96,7%	898	97,6%	917	99,7%
			Anak	37	37	100%	37	100%	37	100%
			Tipikor	25	14	56%	22	88%	22	88%
		Perdata	Gugatan	152	124	81,6%	136	89,5%	145	95,4%
			PHI	135	135	100%	74	54,8%	135	100%
3.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	264	263	99,6%	260	98,5%	264	100%
			Anak	4	4	100%	4	100%	4	100%
		Perdata	Gugatan	33	30	90,9%	31	93,9%	33	100%
4.	PN Rangkas-bitung	Pidana	Biasa	166	160	96,4%	162	97,6%	166	100%
			Anak	15	14	93,3%	14	93,3%	15	100%
		Perdata	Gugatan	17	5	29,4%	13	76,5%	15	88,2%

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2019.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH.2019	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	PN Tangerang	581	40	536	5	-
2.	PN Serang	134	10	124	-	-
3.	PN Pandeglang	30	2	28	-	-
4.	PN Rangkas-bitung	17	-	17	-	-

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang berhasil didiversi pada tahun 2019.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2019	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2019	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
				BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	PN Tangerang	78	3	3	-	-	-
2.	PN Serang	37	37	5	32	-	-
3.	PN Pandeglang	4	1	1	-	-	-
4.	PN Rangkas-bitung	15	-	-	-	-	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan program dari Ditjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Di dalam program akreditasi penjaminan mutu ini diatur pengelolaan Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo yang juga didukung dengan tersedianya anggaran pada DIPA 03 dalam rangka memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

1. POSBAKUM

Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan pelayanan pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan dengan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan dokumen berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau KKM/Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS/ dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu.
2. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan dan disetujui oleh petugas posbakum.

Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN POSBAKUM	REALISASI	PERSENTASE
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Rp. 48.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	83,33%
2.	Pengadilan Negeri Serang	Rp. 48.000.000,-	Rp. 48.000.000,-	100%
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.000.000,-	99,36%
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-	100%

3. SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di suatu tempat di luar gedung Pengadilan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Program ini untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di mana ada kesulitan untuk menjangkau gedung pengadilan karena hambatan biaya, fisik maupun geografis. Namun demikian, tidak ada alokasi anggaran untuk program tersebut pada satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada kegiatan sidang keliling selama tahun 2019. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Tangerang, ada kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2019, yaitu untuk perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Laporan Perkara Tipiring PN Tangerang Tahun 2019

No.	Bulan	Masuk	Putus	Denda (Rp.)
1.	Januari	4	4	12.748.000
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	5	5	29.745.000
4.	April	6	6	31.942.000
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	3	3	17.048.000
7.	Juli	2	2	4.577.000
8.	Agustus	4	4	13.132.500
9.	September	1	1	19.892.000
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	1	1	1.578.000
12.	Desember	1	1	495.000

4. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Berdasarkan Perma No.1 tahun 2014, bahwa layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Program ini ditujukan bagi orang/ sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan realisasinya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN PERKARA PRODEO	REALISASI	PERSENTASE
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Rp. 1.290.000,-	528.000	40,9%
2.	Pengadilan Negeri Serang	Rp. 1.840.000,-	-	-

Pada tahun 2019 tidak ada realisasi anggaran perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Serang dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2019 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 3 (tiga) perkara, yang masuk pada bulan Mei (2 perkara) dan September (1 perkara).

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini rincian komposisi SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan per 2 Januari 2020.

KETERANGAN		KOMPOSISI SDM SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE-RANG	PN SERANG	PN PANDE-GLANG	PN RANGKAS-BITUNG
JUMLAH SDM		74	124	82	45	35
KEPANGKATAN (GOL. /RUANG)	Pembina Utama (IV/e)	29	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	15	2	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	10	5	-	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	8	15	-	1
	Pembina (IV/a)	6	7	11	3	2
	Penata Tingkat I (III/d)	13	34	15	9	12
	Penata (III/c)	8	23	15	20	5
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	14	10	7	11
	Penata Muda (III/a)	4	2	6	5	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	2	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	5	1	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	1	2	1	1
	Pengatur Muda (II/a)	-	3	-	-	-
PENDIDIKAN	S3	4	-	1	-	-
	S2	32	40	33	11	10
	S1	35	62	39	25	24
	D3	-	1	0	2	-
	SMA	3	18	8	7	8
	SMP	-	2	-	-	-
	SD	-	1	1	-	-

1. MUTASI

a. Mutasi Masuk

Mutasi masuk pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2019 secara keseluruhan ada 43 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA (MUTASI DARI)
1.	PT BANTEN	KUSRIYANTO, S.H., M.HUM	HAKIM TINGGI	HAKIM PT YOGYAKARTA
2.	PT BANTEN	UMBU JAMA, S.H.	HAKIM TINGGI	HAKIM PT PALANGKARAYA
3.	PT BANTEN	POSMAN BAKARA, S.H.	HAKIM TINGGI	HAKIM PT PALU
4.	PT BANTEN	VICTOR S. Z., S.H., M.HUM	HAKIM TINGGI	HAKIM PT MANADO
5.	PT BANTEN	ENNID H., S.H.. CN. MH.	HAKIM TINGGI	HT YUST BALITBANG
6.	PT BANTEN	H. SARPIN RIZALDI, SH, MH	HAKIM TINGGI	HAKIM PT PEKANBARU
7.	PT BANTEN	LAURENSIUS S., S.H.	HT YUSTISIAL	HAKIM PT SEMARANG
8.	PT BANTEN	SUDIYATNO, S.H., M.H	WAKIL KETUA	KPT GORONTALO
9.	PT BANTEN	HASIAMAH D., S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	HAKIM PT BABEL
10.	PT BANTEN	SOLAHUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	HAKIM PT PALEMBANG
11.	PT BANTEN	SUBACHRAN H. M., S.H.,M.H	HAKIM TINGGI	HAKIM PT TANJUNGKARAG
12.	PT BANTEN	Dr.BINSAR G.,S.H.,S.E.,M.H.	HAKIM TINGGI	HAKIM PT BABEL
13.	PT BANTEN	ANDRY ESWIN S.O,S.H.,M.H	HK YUSTISIAL	HAKIM PN PELALAWAN
14.	PN TANGERANG	R. AJI SURYO S., S.H., M.H.	HAKIM	KPN STABAT
15.	PN TANGERANG	ARIE SATIO R., S.H., M.H.	HAKIM	KPN TEMBILAHAN
16.	PN TANGERANG	ARIF BUDI CAHYONO, S.H.	HAKIM	KPN KAB. MADIUN
17.	PN TANGERANG	FERDINAND M. L., S.H.,M.H.	HAKIM	HAKIM PN MATARAM
18.	PN TANGERANG	TATI DURESLY S., SH	PP	PP PN JAKPUS
19.	PN TANGERANG	LIA MARLIA, S.H.	PP	PANMUD PID PN RANGKAS
20.	PN TANGERANG	DIAN AGUSTUN, S.H.	PP	PP PN RANGKASBITUNG
21.	PN SERANG	ARIEF HAKIM N., S.H., M.H	HAKIM	KPN KOTABUMI
22.	PN SERANG	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H	HAKIM	WKPN BOBONG
23.	PN SERANG	POPOP R. T. K., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN PALEMBANG
24.	PN SERANG	RIKATAMA B., S.H.	HAKIM	WKPN P. PUNJUNG
25.	PN SERANG	BURHANUDDIN, SH.,MH	PANITERA	PAN. PN SUNGGUMINASA
26.	PN SERANG	FERI ARDIANSYA, SH.,MH	PANMUD PHI	PANMUD PID PN SERANG
27.	PN SERANG	YUNITASOFRIANI,SH.,MH	PANMUD PID.	PANMUD PHI PN SERANG
28.	PN SERANG	MEITA YULIANA, SH	PP	PANMUD HUKUM PN PANDEGLANG
29.	PN SERANG	ABDUL SHOMAD, SH., MH	PP	PP PN JAKPUS
30.	PN SERANG	FIRDAUS A., SH.,MH	PP	PP PN PANDEGLANG
31.	PN SERANG	ACHMAD FAUZAN,SH	PP	PP PN PANDEGLANG
32.	PN SERANG	MUHAMMAD NUR ,SH	JURUSITA	JSP PN SERANG
33.	PN PANDEGLANG	ARDHI W., SH , M.HUM	KETUA	KPN KOTA AGUNG
34.	PN PANDEGLANG	WINDY RATNA SARI, S.H	WKPN	WKPN KOTABUMI
35.	PN PANDEGLANG	ANGGI P., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN CALANG
36.	PN PANDEGLANG	EKO SUHARJONO, SH.,MH	PANITERA	PANMUD PDT PN DEPOK
37.	PN PANDEGLANG	INTAN FEBRIANTI, SH	PP	STAF PN RANGKASBITUNG
38.	PN PANDEGLANG	NUR HIDAYAH, SH	PP	STAF PN RANGKASBITUNG

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA (MUTASI DARI)
39.	PN PANDEGLANG	HASEFIN BERHAYAN	JURUSITA	STAF PN RANGKASBITUNG
40.	PN RANGKASBITUNG	DUDI GUSMAWAN, S.H.	PANMUD PID.	PP PN BOGOR
41.	PN RANGKASBITUNG	SERLI BARLIANA S., SH	PP	JSP PN SERANG
42.	PN RANGKASBITUNG	WAWAN AWALUDIN	JURUSITA	JS PN PANDEGLANG
43.	PN RANGKASBITUNG	RISSA OKTAVIA, SH	PP	STAF PN RANGKASBITUNG

b. Mutasi Keluar

Mutasi keluar pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2019 secara keseluruhan ada 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU (MUTASI KE)
1.	PT BANTEN	SHARI DJATMIKO, S.H., MH	HAKIM TINGGI	PT SEMARANG
2.	PT BANTEN	SYAFRULLAH S., S.H., MH	WAKIL KETUA	KPT GORONTALO
3.	PT BANTEN	EMI TRI RAHAYU, S.H., M.H.	HK. NONPALU	HAKIM PN PARIAMAN
4.	PT BANTEN	ANDRIANTO F., S.KOM	STAF	KASUBAG PTIP PN SEKAYU
5.	PN TANGERANG	EDY PURWANTO, SH	HAKIM	HT PT GORONTALO
6.	PN TANGERANG	Dr. I KETUT S., S.H., M.H	HAKIM	HT PT JAYAPURA
7.	PN SERANG	SUKRI SULUMIN, SH, MH	WAKIL KETUA	KPN CILACAP
8.	PN SERANG	EFIYANTO D., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN TANJ.KARANG
9.	PN SERANG	ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SIDOARJO
10.	PN SERANG	ABNER SIRAIT, SH., MH	PANITERA	PANITERA BALIKPAPAN
11.	PN PANDEGLANG	AS'AD RAHIM, SH, MH	KETUA	WKPN RANTAU PRAPAT
12.	PN PANDEGLANG	SABDA SIREGAR, SH.,MH	PANITERA	PP PT JAKARTA
13.	PN PANDEGLANG	MARTUA FERNANDO M.,SH	STAF	PP PN BANYUMAS
14.	PN RANGKASBITUNG	DEDE HALIM, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KPN SAWAHLUNTO
15.	PN RANGKASBITUNG	ADANG SUJANA, S.H	JSP	PP PN CIKARANG

2. PROMOSI

Promosi jabatan SDM pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	PT BANTEN	SYAFRULLAH S., S.H., MH	WAKIL KETUA	KPT GORONTALO
2.	PT BANTEN	ANDRIANTO F., S.KOM	STAF	KASUBAG PTIP PN SEKAYU
3.	PN TANGERANG	EDY PURWANTO, SH	HAKIM	HT PT GORONTALO
4.	PN TANGERANG	Dr. I KETUT S., S.H., M.H	HAKIM	HT PT JAYAPURA
5.	PN SERANG	SUKRI SULUMIN, SH, MH	WAKIL KETUA	KPN CILACAP
6.	PN SERANG	ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SIDOARJO
7.	PN SERANG	MUHAMMAD NUR ,SH	JSP	JURUSITA PN SERANG
8.	PN SERANG	SERLI BARLIANA S., SH	JSP	PP PN RANGKASBITUNG
9.	PN PANDEGLANG	SABDA SIREGAR, SH.,MH	PANITERA	PP PT JAKARTA
10.	PN PANDEGLANG	MARTUA FERNANDO M.,SH	STAF	PP PN BANYUMAS
11.	PN PANDEGLANG	MEITA YULIANA, S.H.	PANMUD HUKUM	PP PN SERANG

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
12.	PN PANDEGLANG	FIRDAUS A., S.H., M.H.	PP	PP PN SERANG
13.	PN PANDEGLANG	ACHMAD FAUZAN, S.H.	PP	PP PN SERANG
14.	PN RANGKASBITUNG	DEDE HALIM, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KPN SAWAHLUNTO
15.	PN RANGKASBITUNG	ADANG SUJANA, S.H	JSP	PP PN CIKARANG
16.	PN RANGKASBITUNG	LIA MARLIA, S.H.	PANMUD PIDANA	PP PN TANGERANG
17.	PN RANGKASBITUNG	DIAN AGUSTIN, S.H.	PP	PP PN TANGERANG
18.	PN RANGKASBITUNG	INTAN FEBRIANTI, S.H.	STAF	PP PN PANDEGLANG
19.	PN RANGKASBITUNG	NUR HIDAYAH, S.H.	STAF	PP PN PANDEGLANG
20.	PN RANGKASBITUNG	HASEFIN BERHAYAN, S.H.	STAF	JURUSITA
21.	PN RANGKASBITUNG	RISSA OKTAVIA, S.H.	STAF	PP

Selain itu, dapat diinformasikan pula jumlah SDM yang memperoleh kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala selama tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi banten dan Pengadilan Negeri sewilayah banten adalah sebagai berikut :

- **Kenaikan Pangkat :**
  1. Pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah 13 orang.
  2. Pada Pengadilan Negeri Tangerang berjumlah 10 orang.
  3. Pada Pengadilan Negeri Serang berjumlah 22 orang.
  4. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah 11 orang.
  5. Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berjumlah 10 orang.
- **Kenaikan Gaji berkala :**
  1. Pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah 22 orang.
  2. Pada Pengadilan Negeri Tangerang berjumlah 63 orang.
  3. Pada Pengadilan Negeri Serang berjumlah 36 orang.
  4. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah 28 orang.
  5. Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berjumlah 28 orang.

3. PENSIUN

Data hakim dan pegawai pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang pensiun pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN	KET.
1.	PT BANTEN	PATUAN SIMANJUNTAK,S.H.	PP	1 MEI 2019	PENSIUN
2.	PT BANTEN	NETTI SRININGSIH, SH.,MSi	PANITERA	1 NOVEMBER 2019	PENSIUN
3.	PT BANTEN	AGUS HERJONO, S.H.	HAKIM TINGGI	1 DESEMBER 019	PENSIUN
4.	PN TANGERANG	MANAT LUMBAN GAOL, S.H.	PP	1 JUNI 2019	PENSIUN
5.	PN TANGERANG	TONNY SEPTOMULYANA,SH.	PP	1 OKTOBER 2019	PENSIUN
6.	PN TANGERANG	TRINO IRWAN, S.H.	JURUSITA	1 OKTOBER 2019	PENSIUN
7.	PN SERANG	Drs. DADI SURYADI	SEKRETARIS	1 MEI 2019	PENSIUN
8.	PN SERANG	ASWIR, SH	HAKIM	1 AGUSTUS 2019	MENINGGAL
9.	PN SERANG	GINAGAN, SH	PP	1 DESEMBER 2019	MENINGGAL
10.	PN PANDEGLANG	DJOKO HARIYADI, SH	SEKRETARIS	1 MARET 2019	PENSIUN
11.	PN RANGKASBITUNG	HIDAYAT	PP	1 JUNI 2019	PENSIUN
12.	PN RANGKASBITUNG	TAUFIK HIDAYAT	PP	1 JUNI 2019	PENSIUN
13.	PN RANGKASBITUNG	ABDURAHMAN SIATAN	PP	1 JULI 2019	PENSIUN
14.	PN RANGKASBITUNG	MUALIMIN	PP	1 SEPTEMBER 2019	PENSIUN
15.	PN RANGKASBITUNG	YATI SUTJIATI	KASUB. U&K	1 DESEMBER 2019	PENSIUN

4. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Data hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten yang mengikuti diklat teknis dan non teknis selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Diklat Teknis

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	PN TANGERANG	MUHAMMAD DAMIS, SH., MH.	KETUA	- SEMINAR "PERAN CONTEMPT OF COURT DALAM PERLINDUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI DAN BEBAS DARI SEGALA ANCAMAN" - TRAINING OF TRAINERS DIKLAT 3 PROGRAM PPC TERPADU ANGKATAN III - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER BAGI PEGAWAI PENGADILAN
2.	PN TANGERANG	SUPRAPTI, SH.,MH	WAKIL KETUA	- SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER BAGI PEGAWAI PENGADILAN
3.	PN TANGERANG	MAHMURIADIN, SH	HAKIM	- SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
4.	PN TANGERANG	YANWITRA, SH., MH	PANITERA	- BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.3.0 - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER
5.	PN TANGERANG	M. TAUFIK AKBAR, SKOM	HONORER	- BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.3.0 - SEMINAR DAN PELATIHAN TEKNIS E-KATALOG LKPP 2019
6.	PN TANGERANG	ARIE SATIO R., SH., MH	HAKIM	- PELATIHAN PEMERIKSAAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN KERJASAMA DENGAN KEMITRAAN
7.	PN TANGERANG	R. AJI SURYO, SH., MH	HAKIM	- PELATIHAN PEMERIKSAAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN KERJASAMA DENGAN KEMITRAAN
8.	PN TANGERANG	ELLY NOERYASMIN, SH., MH	HAKIM	- WORKSHOP EVALUASI 5 (LIMA) TAHUN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
9.	PN SERANG	SUKRI SULUMIN, SH., MH	WAKIL KETUA	- PELATIHAN TEKNIS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN - ASSESMENT CENTRE SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADAYA & PRATAMA MAHKAMAH AGUNG - BIMTEK SIPP VERSI 3.3.0
10.	PN SERANG	H, SANTHOS W. P., SH., MH	HAKIM	- PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM PHI
11.	PN SERANG	ABNER SIRAIT, SH., MH.	PANITERA	- PELATIHAN INPUT DATA PUTUSAN PN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI HASIL REVITALISASI DIREKTORI PUTUSAN
12.	PN SERANG	HAIDAR MUBAROK, SHI	STAF	- PELATIHAN INPUT DATA PUTUSAN PN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI HASIL REVITALISASI DIREKTORI PUTUSAN
13.	PN SERANG	NONI MAULIYANA	STAF	- PELATIHAN INPUT DATA PUTUSAN PN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI HASIL REVITALISASI DIREKTORI PUTUSAN
14.	PN SERANG	WISNU RAHADI, SH., MHUM	HAKIM	- DIKLAT TERPADU SPPA
15.	PN SERANG	GUSE PRAYUDI, SH., MH	HAKIM	- SELEKSI CALON ASSESOR TENAGA TEKNIS - PROGRAM SERTIFIKASI ASSESOR
16.	PN SERANG	CHAIRIL ANWAR, SH., MHUM	HAKIM	- SELEKSI UJI KEPATUHAN DAN KELAYAKAN BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KELAS IB

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
17.	PN SERANG	SLAMET WIDODO, SH., MH	HAKIM	- DIKLAT TERPADU MINERAL DAN BATUBARA
18	PN SERANG	BURHANUDDIN, SH., MH	PANITERA	- BIMTEK SIPP VERSI 3.3.0
19	PN SERANG	ANTONIUS S., SH., MH	PANMUD PDT	- BIMTEK SIPP VERSI 3.3.0
20.	PN SERANG	ADE SUMITRA H., SH., MHUM	HAKIM	- DIKLAT TERPADU ILLEGAL FISHING
21.	PN PANDEGLANG	MARIA KRISTA ULINA GINTING, SH., MKn.	HAKIM	- DIKLAT SISTEM PERADILAN ANAK TERPADU
22.	PN RANGKASBITUNG	RAHMAWATI, SH., MH	HAKIM	SPPA ANGKATAN IX
23.	PN RANGKASBITUNG	ANGGRAINI, SH	CAKIM	PELATIHAN CALON HAKIM
24.	PN RANGKASBITUNG	ANISA PUTRI H., SH	CAKIM	PELATIHAN CALON HAKIM
25.	PN RANGKASBITUNG	RICHA S., SH	CAKIM	PELATIHAN CALON HAKIM
26.	PN RANGKASBITUNG	JOVITA A. S., SH	CAKIM	PELATIHAN CALON HAKIM

b. Diklat Nonteknis

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	PT BANTEN	NURFITRI, S.KOM	STAF	DIKLAT PENGADAAN BARANG/ JASA
2.	PT BANTEN	ANDRIANTO F., SH.	STAF	DIKLAT PENGADAAN BARANG/ JASA
3.	PT BANTEN	TEGUH B., SH.,MH	KABAG. UM & KEU	DIKLAT PROTOKOL
4.	PT BANTEN	HERRY S., SKOM	KASUBAG K & TI	DIKLAT MANAJEMEN ASN
5.	PT BANTEN	RIDARTO, SH., MH	SEKRETARIS	DIKLAT MANAJEMEN PENGADILAN TINGKAT LANJUT
6.	PT BANTEN	NINIK FAUJIAH, S.SOS	STAF	DIKLAT SERTIFIKASI BENDAHARA PENGELUARAN
7.	PN TANGERANG	H. AHMAD HAKIR, SH., MH	SEKRETARIS	- BIMTEK KEPEGAWAIAN - DIKLAT MANAJEMEN PERADILAN TINGKAT LANJUT - SOSIALISASI TATA KERJA REVISI ANGGARAN TA.2019 - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER BAGI PEGAWAI PENGADILAN
8.	PN TANGERANG	DESSY HERLIANI, S.SOS	KABAG UMUM	- BIMTEK KEPEGAWAIAN - DIKLAT MANAJEMEN PERADILAN TINGKAT LANJUT - DIKLAT STRUKTURAL KEPEMIMPINAN TK.III - SOSIALISASI PMK 195/PMK.05/2018, PMK 196/PMK.05/2018 DAN IMPLEMENTASI SAKTI - SEMINAR DAN PELATIHAN TEKNIS E-KATALOG LKPP 2019 - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER BAGI PEGAWAI PENGADILAN
9.	PN TANGERANG	DITA ANDIKA, SH., MH	KASUBAG PTIP	- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK IV

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
10.	PN TANGERANG	BAYU F.L.B, ST., MH	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	- DIKLAT KEPEMIMPINAN TK IV - BIMTEK PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER
11.	PN TANGERANG	H. RACHMAT B.	KASUB. KEPEG.	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
12.	PN TANGERANG	M.TOUFAN P.P., SE	STAF	- SOSIALISASI CAPAIAN IKPA KPPN TANGERANG - BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN - SOSIALISASI PMK 195/PMK.05/2018, PMK 196/PMK.05/2018 DAN IMPLEMENTASI SAKTI
13.	PN TANGERANG	ADHI FIRZIA MIHRAM	STAF	- SEMINAR DAN PELATIHAN TEKNIS E-KATALOG LKPP 2019 - SOSIALISASI TATA KERJA REVISI ANGGARAN TA 2019
14.	PN TANGERANG	ALICIA T. W., SH	STAF	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
15.	PN TANGERANG	IKE RUSTIATI, SH	STAF	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
16.	PN TANGERANG	LESTARI NOVIDA G.	JSP	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
17	PN TANGERANG	CECEP MUNADI	STAF	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
18.	PN TANGERANG	FREZI W., SH	STAF	- SOSIALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT SATUAN KERJA - PELATIHAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DAN PEMBUATAN INFOGRAFIS
19.	PN TANGERANG	FIRMAN SYAWLANA, AMD.	HONORER	- PELATIHAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DAN PEMBUATAN INFOGRAFIS - PELATIHAN BUILDING GREAT RELATIONSHIP WITH CUSTOMER
20.	PN TANGERANG	AGUS SOFYAN, SH	PANMUD PERDATA	- DIKLAT KEPROTOKOLAN TINGKAT MANAJERIAL TAHUN 2019
21.	PN SERANG	RIZA KUSUMA, SH	STAF	- BIMTEK PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA - SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH - BIMTEK PENYUSUNAN LAPKEU
22.	PN SERANG	ARVIANTO CANDRA W., SKOM	STAF	- BIMTEK PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA - BIMTEK ANALISA LAPKEU DAN OVERVIEW SAKTI
23.	PN SERANG	DEWI WULYAN, SE., M.AK.	KASUBAG PTIP	- BIMTEK ANALISA LAPKEU DAN OVERVIEW SAKTI - SOSIALISASI SAP - BIMTEK PENYUSUNAN LAPKEU
24.	PN SERANG	UJAJA, SH	SEKRETARIS	- BIMTEK KEPEGAWAIAN (PENYUSUNAN ABK)
25.	PN SERANG	NINA M., ST., MH	KASUB. KEPEG.	- BIMTEK KEPEGAWAIAN
26.	PN SERANG	HAIDAR MUBAROK, SHI	STAF	- BIMTEK KEPEGAWAIAN - PELATIHAN DASAR CPNS GOL. III - TRAINING PETUGAS PTSP
27.	PN SERANG	M. PADLY PRADANA D. L., SE	STAF	- BIMTEK KEPEGAWAIAN - PELATIHAN DASAR CPNS GOL. III
28.	PN SERANG	RUDIYANTA, SE	STAF	- BIMTEK UPDATE APLIKASI GPP
29.	PN SERANG	SITI NUR'AENI		- TRAINING PETUGAS PTSP
30.	PN PANDEGLANG	NITA YUNITA, SH	STAF	DIKLAT PENGADAAN BARANG/ JASA
31.	PN PANDEGLANG	IIS SETIAWATI, SH	STAF	DIKLAT PENGADAAN BARANG/ JASA
32.	PN RANGKASBITUNG	RAJA AS S., SH	STAF	PELATIHAN DASAR CPNS

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan salah satu program yang ada dalam DIPA 01 (DIPA dari Badan Urusan Administrasi). Komposisi belanja DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten secara keseluruhan pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

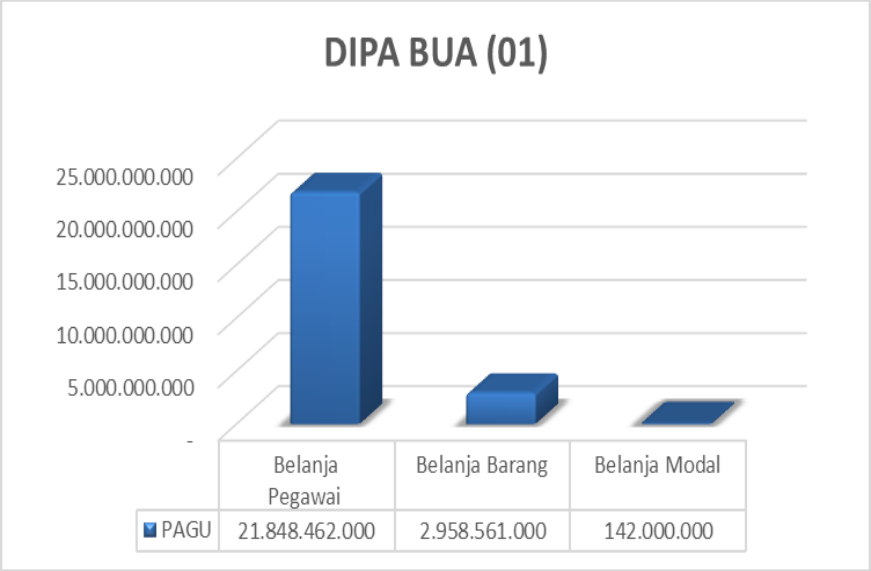

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 24.949.023.000,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus empat uluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah)*, yang di dalamnya terdiri 2 (dua) macam belanja yaitu :

a. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2019 pagu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 21.848.462.000,- (*Dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2019 realisasi sebesar Rp.21.826.764.195,- (*Dua puluh satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*) atau sebesar 99,90 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 21.687.805,- (*Dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah*).

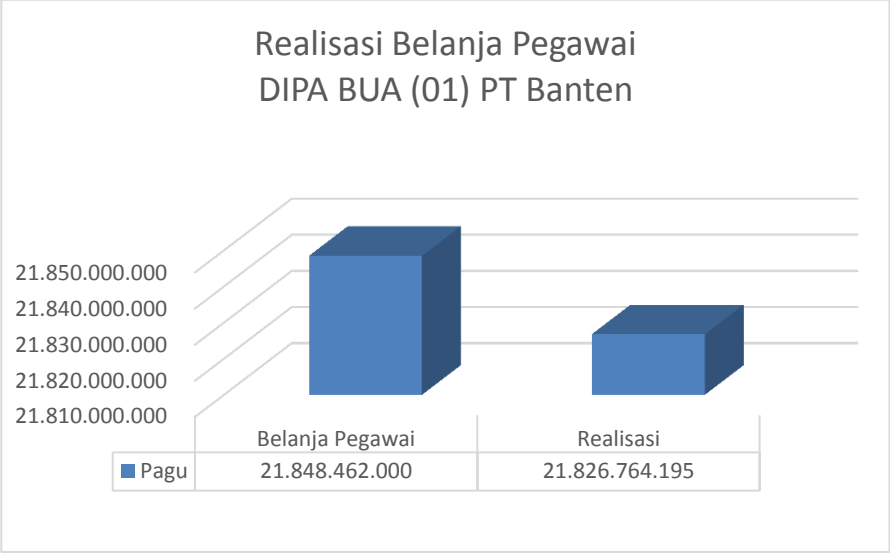

b. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2019 pagu untuk belanja barang yaitu sebesar Rp. 2.958.561.000,- (*Dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2019 realisasi sebesar Rp.2.863.163.703,- (*Dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*) atau sebesar 96,78 % dari anggaran dengan sisa sebesar 95,397,297 Rp. 95.397.297,- (*sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

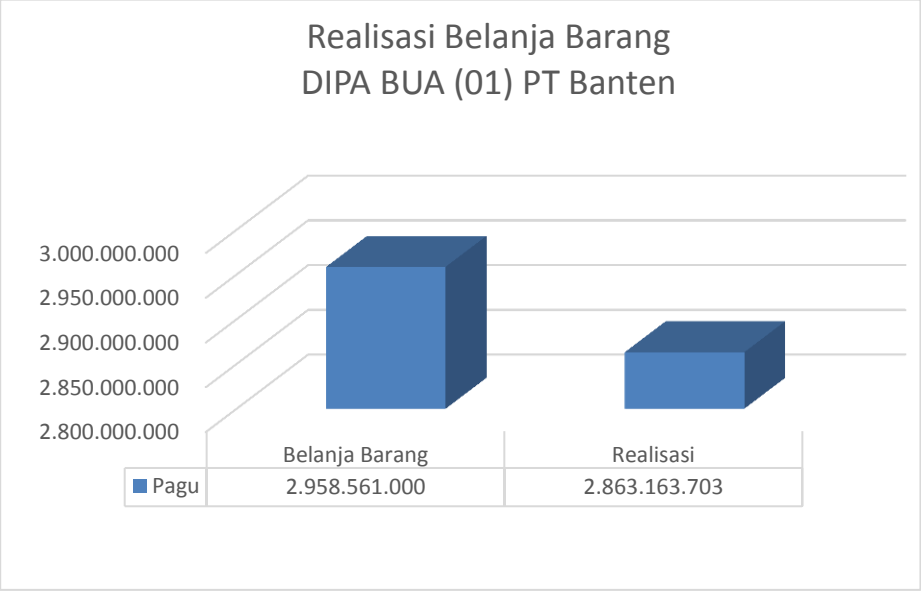

Adapun data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	SATKER	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp.)			PERSEN-TASE REALISASI
			PAGU	REALISASI	SISA	
1.	PN TANGERANG	PEGAWAI	17.995.667.000	17.987.811.811	7.855.189	99,95%
		BARANG	2.399.858.000	2.029.264.166	370.593.834	84,55%
2.	PN SERANG	PEGAWAI	15.378.582.000	15.304.881.340	73.700.660	99,53%
		BARANG	2.265.306.000	2.117.515.337	147.790.663	93,48%
3.	PN PANDEGLANG	PEGAWAI	4.270.028.000	4.213.865.831	56.162.169	98,69%
		BARANG	954.754.000	912.388.408	42.365.592	95,56%
4.	PN RANGKAS-BITUNG	PEGAWAI	5.041.405.000	4.946.975.387	94.429.613	98,12%
		BARANG	1.047.143.000	991.393.936	55.749.064	94,68%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk tahun anggaran 2019 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan anggaran sebesar Rp. 142.000.000,- (*Seratus empat puluh dua juta rupiah*). Anggaran tersebut terbagi untuk 1 (satu) kegiatan pengadaan yaitu :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

  Anggaran untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 142.000.000 (*seratus empat puluh dua juta rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 141.994.400,- (*seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 99,99 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 5.600,- (*Lima ribu enam ratus rupiah).*

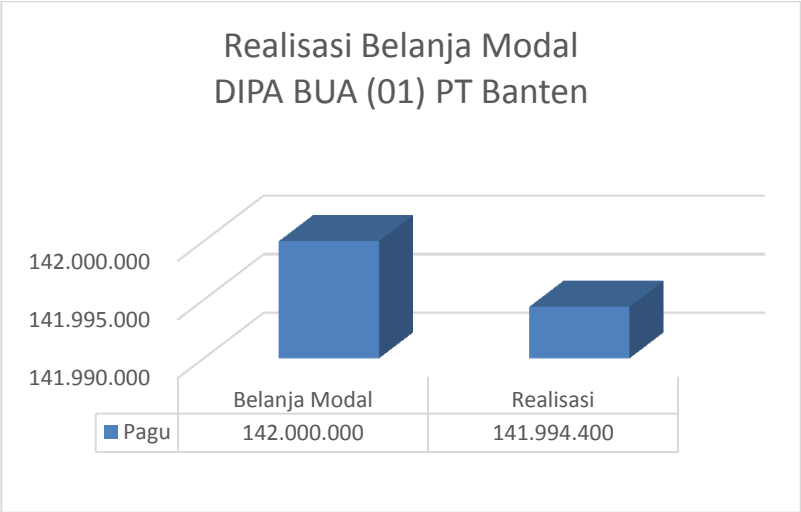

Adapun data penyerapan anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Penyerapan Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Sewilayah Banten

NO.	SATKER	PAGU (Rp.)	REALISASI (RP.)	SISA (Rp.)	PERSEN-TASE REALISASI
1.	PN TANGERANG	100.000.000	99.880.000	120.000	99,88%
2.	PN SERANG	810.426.000	810.068.000	358.000	99,96%
3.	PN PANDEGLANG	375.739.000	375.690.653	48.347	99,99%
4.	PN RANGKASBITUNG	75.000.000	75.000.000	-	100%

Bahwa untuk Pengadilan Negeri Tangerang dan Rangkasbitung pada tahun 2019 hanya memperoleh alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi. Untuk Pengadilan Negeri Pandeglang memperoleh alokasi belanja modal untuk Pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pembangunan Lanjutan Gedung karena tunggakan TA.2017 yang sudah direalisasi pembayarannya pada tahun 2019. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Serang mendapatkan alokasi belanja modal yang terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut :

SATKER	KOMPONEN BELANJA MODAL	PAGU (Rp.)	REALISASI (RP.)	SISA (Rp.)	PERSEN-TASE REALISASI
PN SERANG	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	137.500.000	137.500.000	-	100%
	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	170.000.000	169.785.000	215.000	99,87%
	PEMBANGUNAN/ RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN	502.926.000	502.783.000	143.000	99,97%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 165.284.000,- (*Seratus enam puluh ima juta dua ratus delapan uluh empat ribu rupiah*) yang merupakan Belanja Barang. Sampai dengan bulan Desember 2019 anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 161.953.965,- (*Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*) atau sebesar 97,99 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 3.330.350,- (*tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

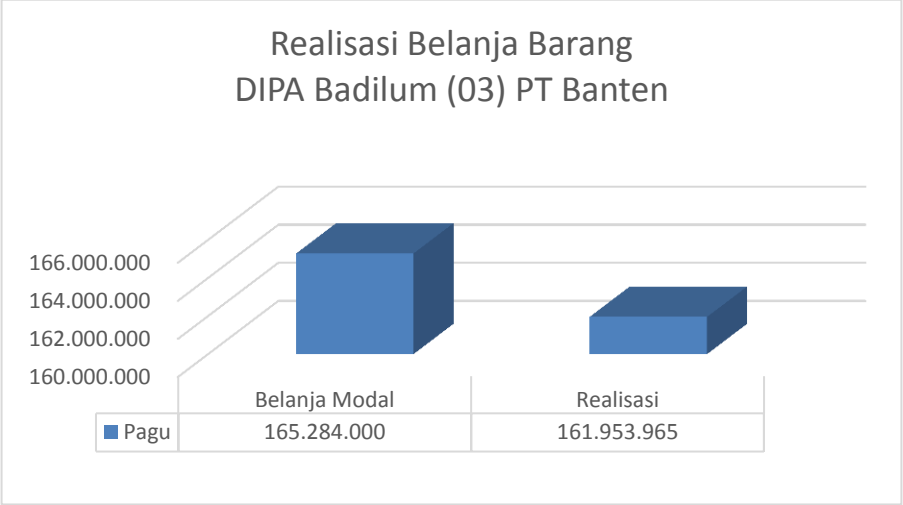

Adapun data penyerapan anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	SATKER	JENIS OUTPUT	PAGU (Rp.)	REALISASI (RP.)	PERSEN-TASE REALISASI
1.	PN TANGERANG	Pos Bantuan Hukum	48.000.000	44.000.000	91,66%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	563.470.000	528.297.800	93,76%
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	1.290.000	528.000	40,9%
2.	PN SERANG	Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	760.545.000	701.085.295	92,18%
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	1.840.000	-	-
3.	PN PANDE-GLANG	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.000.000	99,36%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	120.600.000	118.219.000	98,03%
4.	PN RANG-KASBITUNG	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	92.460.000	83.342.600	90,13%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Tinggi Banten meliputi gedung, alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, rumah dinas dan kendaraan dinas.

1. Sarana dan Prasarana Gedung beserta Fasilitasnya

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Bahwa gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun pada tahun 2004 dengan beberapa penambahan bangunan pada tahun 2006 dan belum memenuhi bentuk prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung hingga saat ini. Untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Serang, Rangkasbitung dan Pandeglang telah memenuhi prototype. Sedangkan untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Tangerang masih belum prototype.

Adapun data sarana dan prasarana gedung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut :

NO.	SARANA/ PRASARANA GEDUNG	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE-RANG	PN SERANG	PN PANDE-GLANG	PN RANGKAS-BITUNG
1.	Ruang Ketua	1	1	1	1	1
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	1	1	1
3.	Ruang Hakim	10	1	9	2	1
4.	Ruang Panitera	1	1	1	1	1
5.	Ruang Sekretaris	1	1	1	1	1
6.	Ruang Kabag	2	1	-	-	-
7.	Ruang Kepaniteraan	4	3	5	3	3
8.	Ruang Kesekretariatan	4	3	3	3	3
9.	Ruang Panitera Pengganti	1	1	3	1	1
10.	Ruang Jurusita	-	1	1	-	1
11.	Ruang Sidang	2	8	6	3	3
12.	Ruang Sidang Anak	-	1	1	1	1
13.	Ruang Arsip	1	1	4	3	2
14.	Ruang Perpustakaan	1	1	1	1	1
15.	Ruang server	1	1	1	1	1
16.	Ruang PTSP	1	1	1	1	1
17.	Ruang Tunggu	1	5	1	3	1
18.	Pojok E-Court	-	1	1	1	1
19.	Ruang/ Meja Inzage	1	1	1	1	1

20.	Ruang Tunggu Jaksa	-	-	1	1	1
21.	Ruang Tunggu Anak	-	-	1	2	1
22.	Ruang Mediasi	-	1	1	1	1
23.	Ruang Posbakum	-	1	1	1	1
24.	Ruang Tahanan	-	1	1	3	1
25.	Ruang Laktasi	-	1	1	1	1
26.	Ruang Wartawan	-	-	1	-	-
27.	Ruang Barang Bukti	-	-	1	1	-
28.	Ruang Kesehatan	-	-	1	1	-
29.	Mushola	1	2	1	1	1
30.	Gudang	1	5	5	2	1
31.	Pos Jaga	1	2	2	1	2

b. Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Sarana dan Prasarana alat pengolah data dan komunikasi merupakan alat untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga berjalan lancar. Data sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

NO.	SARANA/ PRASARANA ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE-RANG	PN SERANG	PN PANDE-GLANG	PN RANGKAS-BITUNG
1.	Access point	4	4	11	2	-
2.	CCTV	8	1	47	1 (12 titik)	3
3.	Facsimile	1	2	3	1	1
4.	Infocus	1	1	1	1	1
5.	Laptop/note book	43	42	36	18	26
6.	P.C. Unit	20	173	68	48	41
7.	PABX	1	1	-	-	-
8.	Pesawat Telepon	3	-	-	2	1
9.	Printer	34	87	38	30	42
10.	Router	1	1	3	1	1
11.	Scanner	8	25	8	4	1
12.	Server	1	3	4	2	3
13.	Switch hub	1	2	2	12	2
14.	UPS	2	6	4	2	18
15.	Wireless Access Point	1	-	2	8	1
16.	Mesin ketik	-	36	15	2	-

c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran merupakan sarana dan meubelair baik yang ada di kantor maupun di rumah dinas. Data sarana dan prasarana fasilitas perkantoran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

NO.	SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE-RANG	PN SERANG	PN PANDE-GLANG	PN RANGKAS-BITUNG
	A.C. Split	38	43	73	33	37
	A.C. Window	-	5	-	-	-
	A.C. Central	-	5	11	2	-
	A.C. Portable	-	2	-	-	-
	Amplifier	-	1	1	-	-
	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	2	6	1	1	1
	Alat Pemotong Kertas	-	-	1	-	-
	Alat Pengaman/Sinyal	5	-	-	-	-
	Alat rumah tangga lainnya	4	-	-	1	-
	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	-	-	15	-	-
	Bangku Panjang Besi/Metal	5	64	23	17	27
	Bangku Panjang Kayu	10	70	118	16	-
	Bingkai foto	1	-	-	-	-
	Brankas	1	6	4	2	3
	Buffet	3	-	8	-	2
	Camera Digital	2	-	1	1	2
	Digital Keyboard Technics/ Organ	2	-	-	-	-
	Dispenser	13	-	-	1	-
	Exhause Fan	2	-	-	-	-
	Filing Cabinet Besi	43	39	31	19	20
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	10	-	-	4
	Genset	1	2	1	1	1
	Gordyn/Kray	5	-	3	1	-
	Handycam	-	-	1	-	-
	Jam Elektronik	9	-	8	5	-
	Jet Pump	2	-	-	-	-
	Kaca Hias	19	-	-	-	1
	Kasur / Spring bed	12	-	-	-	-
	Kipas Angin	5	-	9	2	-
	Kompor gas (alat dapur)	4	-	-	-	-
	Kursi Besi/Metal	357	992	541	133	191

	Kursi Kayu	13	153	51	34	41
	Lambang Garuda Pancasila	7	10	4	3	7
	Lambang Instansi	1	-	4	1	1
	Layar Film/Proyektor	1	-	-	-	-
	LCD Monitor	-	-	1	52	-
	Lemari Besi/Metal	40	49	42	-	6
	Lemari Es	8	-	2	-	-
	Lemari Kayu	77	82	115	19	46
	Lensa Kamera	1	-	-	-	-
	Loudspeaker	-	3	64	-	1
	Meja Kerja Besi/Metal	26	2	32	-	11
	Meja Kerja Kayu	107	466	212	103	92
	Meja Komputer	23	1	10	7	3
	Meja makan kayu	4	1	-	1	-
	Meja Rapat	7	21	18	17	-
	Meja Resepsionis	4	-	3	-	-
	Mesin Absensi	2	1	1	2	2
	Mesin Antrian	-	-	2	-	-
	Mesin cuci	1	-	-	-	-
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	1	1	1
	Meubelair lainnya	1	-	-	-	-
	Microphone/wireless MIC	2	-	17	-	-
	Mimbar/Podium	2	1	-	-	-
	Mobile File	-	-	2	-	-
	Overhead Projector	1	14	-	-	-
	Palu Sidang	1	-	7	-	2
	Papan Visual/Papan Nama	11	-	51	9	15
	Penyemprot tangan (hand sprayer)	1	-	-	-	-
	Pintu Elektrik (akses)	-	-	10	-	-
	Rak Besi	16	70	19	19	9
	Rak Kayu	10	16	13	11	22
	Rak piring alumunium	3	-	-	-	-
	Rambu-rambu	1	-	-	-	-
	Sice	20	35	26	12	18
	Sirine	1	-	-	-	-
	Sound System	3	9	6	5	1
	Tabung Gas	1	-	12	-	-
	Tangki Air	1	-	-	-	-
	Tape Recorder	1	4	-	1	1
	Televisi	22	3	8	-	3

	Tempat tidur kayu	1	-	-	-	-
	Tiang Bendera	-	-	15	-	-
	Tripod Kamera	1	-	-	-	-
	Troli	1	-	2	-	-
	White Board	9	-	12	13	1
	Wireless	-	-	24	-	-

2. Rumah Dinas

Berikut ini data rumah dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.

NO.	SATKER	RUMAH DINAS	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PT BANTEN	RUMAH DINAS KETUA	1	1		
		RUMAH DINAS WKPT	1	1		
		RUMAH DINAS HAKIM	4	2	2	
		RUMAH DINAS PANITERA	1		1	
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1		1	
2.	PN TANGERANG	RUMAH DINAS KETUA	1			
		RUMAH DINAS WKPN	1		1	
		RUMAH DINAS HAKIM	12	1	8	3
		RUMAH DINAS PANITERA	1			1
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1			1
3.	PN SERANG	RUMAH DINAS KETUA	1	1		
		RUMAH DINAS WKPN	1		1	
		RUMAH DINAS HAKIM	7	2	2	3
		RUMAH DINAS PANITERA	1		1	
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-			
4.	PN PANDEGLANG	RUMAH DINAS KETUA	1		1	
		RUMAH DINAS WKPN	1		1	
		RUMAH DINAS HAKIM	9			9
		RUMAH DINAS PANITERA	1		1	
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-			
5.	PN RANGKASBITUNG	RUMAH DINAS KETUA	1		1	
		RUMAH DINAS WKPN	1		1	
		RUMAH DINAS HAKIM	5		5	
		RUMAH DINAS PANITERA	1		1	
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-			

3. Kendaraan Dinas

Berikut ini data kendaraan dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.

NO.	SATKER	KENDARAAN DINAS	TAHUN PERO-LEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PT BANTEN	**KENDARAAN RODA 4**				
		TOYOTA VIOS	2010	√		
		TOYOTA ALTIS	2010		√	
		TOYOTA INNOVA	2009		√	
		TOYOTA INNOVA	2011	√		
		TOYOTA INNOVA	2010		√	
		TOYOTA FORTUNER	(SEWA)	√		
		TOYOTA CAMRY	(SEWA)	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA SUPRA X125	2005		√	
		HONDA TIGER REVO	2008		√	
		HONDA TIGER REVO	2008		√	
		HONDA NEW MEGA PRO CW	2011	√		
		HONDA WIN	2005	√		
2.	PN TANGERANG	**KENDARAAN RODA 4**				
		TOYOTA ALTIS	2018	√		
		SUZUKI ESCUDO SB 416	1997		√	
		KIJANG INOVA E	2010	√		
		KIJANG SUPER KF83LSX	2003		√	
		KIJANG SUPER KF40SHORT	1991			√
		TOYOTA INOVA E	2009	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA MCB 97CC	1996			√
		HONDA GLM II	1997			√
		HONDA GLM II	1997			√
		HONDA WIN MCB	2000		√	
		HONDA NF 125	2003			√
		HONDA NF 125	2005	√		
		HONDA WIN MCB	2004	√		
		HONDA WIN MCB	2004	√		
		HONDA NF 125 SD	2005	√		
		HONDA GLP III	2005	√		
		HONDA MCB	2006			√

a

3.	PN SERANG	**KENDARAAN RODA 4**				
		SEDAN VIOS	2008	√		
		MINIBUS SUZUKI ESCUDO	2006	√		
		MINIBUS KIJANG INNOVA	2011	√		
		MINIBUS ISUZU PANTHER	2002		√	
		MINIBUS NISSAN XTRAIL	2014	√		
		MINIBUS INNOVA G	2014	√		
		MINIBUS INNOVA G	2017	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA NF 125	2005	√		
		HONDA NF 125	2005	√		
		SUPRA X 125 R CW	2005	√		
		SUPRA X 125 R CW	2005	√		
		HONDA NF 125 D	2005	√		
		HONDA NF 125	2004	√		
		HONDA NF 125 SC	2005	√		
		HONDA MEGA PRO	2011	√		
4.	PN PANDEGLANG	**KENDARAAN RODA 4**				
		TOYOTA KIJANG LSX	2003	√		
		TOYOTA KIJANG INNOVA	2008	√		
		TOYOTA FORTUNER	Pemda	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2004		√	
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2004		√	
		HONDA MEGA PRO	2005		√	
		HONDA MEGA PRO	2005		√	
		HONDA MEGA PRO	2007		√	
		HONDA MEGA PRO	2008		√	
		HONDA SUPRA X 125 D	2008		√	
		HONDA SUPRA X 125 D	2008		√	
5.	PN RANGKAS-BITUNG	**KENDARAAN RODA 4**				
		STATION WAGON	2008	√		
		NISSAN XTRAIL	2015	√		
		TOYOTA KIJANG INNOVA	2003	√		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA SUPRA X 125	2009	√		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	√		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	√		
		HONDA TIGER	2008	√		
		HONDA MEGA PRO GL	2007	√		
		HONDA MEGA PRO CW	2005	√		
		HONDA KHARISMA X	2004	√		
		HONDA SUPRA NF100	2001	√		
		HONDA WIN MCB	1996		√	

- **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kegiatan pemeliharaan gedung, rumah dinas, dan peralatan dan mesin di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama tahun 2019 dapat terlihat dari realisasi anggaran pada masing-masing akun belanja kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut.

NO.	SATKER	AKUN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	PT BANTEN	523111 (pemeliharaan gedung)	516.120.000	516.029.500
		523119 (pemeliharaan rumdin)	57.762.000	57.635.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	319.711.000	300.122.157
2.	PN TANGERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	201.000.000	200.572.830
		523119 (pemeliharaan rumdin)	13.105.000	11.505.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	268.976.000	205.021.577
3.	PN SERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	334.500.000	334.076.800
		523119 (pemeliharaan rumdin)	13.715.000	13.473.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	311.569.000	311.249.021
4.	PN PANDEGLANG	523111 (pemeliharaan gedung)	169.513.000	168.850.000
		523119 (pemeliharaan rumdin)	2.837.000	2.800.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	68.816.000	68.644.657
5.	PN RANGKAS-BITUNG	523111 (pemeliharaan gedung)	78.857.000	75.939.140
		523119 (pemeliharaan rumdin)	-	-
		523121 (pem. peralatan/mesin)	145.704.000	132.417.144

- **Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Beberapa penambahan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2019 sebagai berikut :

1). Pengadilan Tinggi Banten

Ada penambahan 11 unit laptop, 1 LCD, 4 PC dan 3 UPS.

2). Pengadilan Negeri Tangerang

Ada penambahan 8 unit laptop.

3). Pengadilan Negeri Serang

Ada penambahan 11 unit laptop, meubelair ruang sidang dan renovasi 3 (tiga) rumah dinas.

4). Pengadilan Negeri Pandeglang

Ada penambahan 3 unit laptop.

5). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Ada penambahan 6 unit laptop dan 1 server ecourt

- **Penghapusan Sarana dan Prasarana**

Tidak ada kegiatan penghapusan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama tahun 2019.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan melalui aplikasi e-court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Untuk mendukung kelancaran operasional pemanfaatan kedua aplikasi ini, maka Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, yaitu :

NO.	SATKER	SARANA/ PRASARANA PENDUKUNG E-COURT DAN SIPP	JUMLAH (UNIT)
1.	PT BANTEN	**PERANGKAT KERAS**	
		SERVER	1
		ROUTER	1
		HUB LAN	1
		PC (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	11
		LAPTOP (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	14
		PERANGKAT LUNAK	
		LAN (LOCAL AREA NETWORK)	1
		ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) ICON+ DENGAN BANDWITH 50 MBPS DEDICATED.	1
		ISP TELKOMNET SPEEDY KABEL OPTIC DENGAN BANDWITH 100 MBPS SHARED.	1
		WEBSITE : http://pt-banten.go.id/	1
2.	PN TANGERANG	**PERANGKAT KERAS**	
		PC SERVER	1
		SWITCH 24 PORT	1
		HUB 16 PORT	2
		MIKROTIK	1
		PC	108
		LAPTOP	42
		PERANGKAT LUNAK	
		ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) MORATELINDO DENGAN BANDWITH 150 MBPS DOMESTIK DEDICATED DAN 20 MBPS INTERNATIONAL DEDICATED.	1
		WEBSITE : http://pn-tangerang.go.id/	1
3.	PN SERANG	**PERANGKAT KERAS**	
		PC SERVER	4
		SWITCH	2
		ROUTER	1
		PC	68
		LAPTOP	36
		PERANGKAT LUNAK	
		ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) FIBERNET DENGAN BANDWITH INTERNET FIBER OPTIC 100 MBPS DEDICATED + 90 MBPS BACKUP WIRELESS 20 MIX	1
		WEBSITE : http://www.pn-serang.go.id/	1

4.	PN PANDEGLANG	**PERANGKAT KERAS**	
		PC SERVER	2
		SWITCH	12
		ROUTER	1
		PC	48
		LAPTOP	18
		PERANGKAT LUNAK	
		ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) PT AWINA GLOBAL MANDIRI, BANDWITH DEDICATED 70 MBPS	1
		WEBSITE : http://pn-pandeglang.go.id/	1
5.	PN RANGKASBITUNG	**PERANGKAT KERAS**	
		PC SERVER	2
		SWITCH	2
		ROUTER	1
		PC	41
		LAPTOP	26
		PERANGKAT LUNAK	
		ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) PALAPA NET, BANDWIDTH 70 MBPS DEDICATED	1
		WEBSITE : http://www.pn-rangkasbitung.go.id/	1

1. Implementasi E-Court

Bahwa untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi e-court sebagai sarana dalam berperkara di Pengadilan secara elektronik. Sampai dengan saat ini, implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Banten baru sampai pelayanan validasi akun pengguna karena untuk perkara banding belum bisa dilayani melalui e-court.

a. Implementasi E-Court di Pengadilan Tinggi Banten

Implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Banten, yaitu dengan adanya pelayanan verifikasi akun pengguna/ advokat yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi e-court. Setiap pengguna/ advokat yang mendaftar untuk mendapatkan akun e-court di wilayah Banten akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai keabsahan dokumen yang bersangkutan berupa KTP, KTA organisasi advokat dan BAS (Berita Acara Sumpah) advokat hingga dinyatakan valid. Berikut data jumlah akun yang sudah terdaftar di e-court wilayah Pengadilan Tinggi Banten :

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2019 (AKUN PENGGUNA)
1.	JUMLAH AKUN PENGGUNA E-COURT YANG SUDAH DIVERIFIKASI DAN VALID (TERDAFTAR)	967
2.	JUMLAH AKUN YANG BELUM VALID	72

Kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten saat ini terkait penerapan aplikasi e-court, yaitu belum adanya menu hapus untuk menghapus akun yang sudah lama diverifikasi dan tidak valid, di mana cenderung akun tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh pembuatnya. Serta belum ada menu untuk menampilkan data jumlah akun yang sudah berhasil divalidasi oleh Pengadilan Tinggi per tahun.

b. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten

Sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa untuk perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum sudah dapat dilayani melalui e-court.

Aplikasi ini terdiri dari 4 fitur, yaitu :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

1). Pengadilan Negeri Tangerang

Beberapa Pengadilan ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai pilot project pelaksanaan e-court, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang.Pengadilan Negeri Tangerang sendiri telah sukses menyabet penghargaan nasional terbaik nomor 2 (dua) penerapan E-Court se-Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi indikator pengadilan mana di Indonesia yang sudah sangat siap menyambut modernisasi dan digitalisasi perkara online guna pengajuan dan penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Indonesia. Pada Tanggal 11 Desember 2019 Pengadilan Negeri Tangerang mengadakan Sosialisasi E-Court dan E-Litigasi yang diadakan di ruang aula Pengadilan Negeri Tangerang, acara Sosialisasi tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita serta dihadiri oleh Ketua Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Perwakilan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dengan Pembicara Ennid Hasanuddin, S.H., C.N, M.H. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.

Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pengguna apilkasi e-court internal berjumlah 92 orang dan jumlah pengguna aplikasi e-court eksternal berjumlah 451 pengguna. Jumlah total perkara perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang mendaftar melalui e-court pada tahun 2019 adalah sebanyak 991 perkara.

2). Pengadilan Negeri Serang

Pengadilan Negeri Serang telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di aula sidang utama Pengadilan Negeri Serang dengan mengundang pengacara, jaksa, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pengguna apilkasi e-court internal berjumlah 69 orang dan jumlah pengguna aplikasi e-court eksternal berjumlah 106 pengguna. Jumlah total perkara perdata Pengadilan Negeri Serang yang mendaftar melalui e-court pada tahun 2019 adalah sebanyak 144 perkara.

3). Pengadilan Negeri Pandeglang

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pengguna aplikasi e-court internal pada Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah 30 orang dan jumlah pengguna aplikasi e-court eksternal berjumlah 12 pengguna. Jumlah total perkara perdata Pengadilan Negeri Pandeglang yang mendaftar melalui e-court pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 perkara.

4). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah pengguna aplikasi e-court pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berjumlah 4 orang. Jumlah total perkara perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mendaftar melalui e-court pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 perkara.

Data perkara perdata dari Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang mendaftar melalui e-court selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	PERKARA PERDATA MELALUI E-COURT PADA TH. 2019	JUMLAH PERKARA			
		PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKASBITUNG
1	GUGATAN	551	53	11	4
2.	BANTAHAN	2	1	-	0
3.	GUGATAN SEDERHANA	11	15	-	0
4.	PERMOHONAN	427	75	1	0
TOTAL		**991**	**144**	**12**	**4**

2. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Aplikasi SIPP ini pun telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten sudah bisa diakses langsung oleh umum (masyarakat pencari keadilan). Sedangkan untuk aplikasi SIPP versi 3.2.0 pada Pengadilan Tinggi Banten (tingkat banding) baru bisa diakses oleh pihak internal (Pengadilan Tinggi), sehingga bagi masyarakat yang ingin mengetahui data perkara tingkat banding dapat mengajukan perhomohonan informasi sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui pelayanan di meja PTSP.

Data statistik perkara pada SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama Januari s.d Desember 2019 (*terlampir*).

Pada tanggal 25 April 2018, Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP (Aplikasi Monitoring SIPP) untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Berikut ini data kinerja tingkat kepatuhan pengisian data SIPP Pengadilan Negeri sewilayah Banten pada akhir tahun 2019 berdasarkan data MIS SIPP.

NO.	PENILAIAN KINERJA SIPP	SATUAN KERJA			
		PN TANGERANG (jml. perkara >2000)	PN SERANG (jml. perkara 1001-2000	PN PANDE-GLANG (jml. perkara 1-500)	PN RANGKAS-BITUNG (jml. perkara 1-500)
1	POSISI URUTAN / PERINGKAT	16	355	139	156
2.	NILAI KINERJA	128,30	136,12	145,42	146,49
3.	NILAI KEPATUHAN	424,27	403,24	493,91	499,05
4.	NILAI KELENGKAPAN	141,17	143,03	144,18	131,42
5.	NILAI KESESUAIAN	152,03	156,23	161,85	164,68
6.	NILAI AKHIR	845,77	838,62	945,36	941,64

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Direktorat Jenderal Baadan Peradilan Umum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. *Sistemik* dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan *"Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E"*. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Ada 7 (tujuh) kriteria dalam penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, yaitu :

1) Kepemimpinan *(Leadership)*
2) Perencanaan Strategis *(Strategic Planning)*
3) Fokus Pelanggan *(Customer Focus)*
4) Manajemen Sumberdaya *(Resounces Management)*
5) Proses Manajemen *(Management Process)*
6) Sistem Dokumen *(Document Sistem)*
7) *Ha*sil Kinerja *(Performance Result)*

Akreditasi penjaminan mutu menjadi salah satu penunjang peningkatan pelayanan publik di Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Dengan adanya program ini, maka setiap SDM di Pengadilan dituntut untuk mempertahankan kinerjanya bahkan meningkatkan kinerjanya.

Seluruh Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu dari Ditjen Badilum dengan nilai sebagai berikut :

NO.	SATKER	TANGGAL SERTIFIKAT AKREDITASI	NILAI
1.	Pengadilan Tinggi Banten	Tanggal : 16 Desember 2016 Nomor : TAPM.03/QMR/SERTIFIKAT/12/2016	A
2.	Pengadilan Negeri Tangerang	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.081/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A
3.	Pengadilan Negeri Serang	Tanggal : 16 Desember 2016 Nomor : TAPM.048/QMR/SERTIFIKAT/12/2016	A
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.083/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.082/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A

Capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten ini dievaluasi secara berkala. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan terkait APM selama tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeru sewilayah Banten:

a. APM Pengadilan Tinggi Banten

Pada Pengadilan Tinggi Banten telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/67/KPT/SK/KP.10.01/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten (*terlampir*). Selanjutnya telah dilaksanakan audit internal pada tanggal 14 s.d 15 Agustus 2019. Dari hasil laporan audit Pengadilan Tinggi Banten tersebut semua ketidaksesuaian yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu target penyelesaiannya. Adapun hal-hal yang ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu telah dibentuk tim manajemen resiko, telah dilaksanakan monev terhadap jurusita di Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan delegasi, laporan/ berita acara penyerahan putusan pidana kepada panitera muda hukum, berdasarkan data di SIPP bahwa pelaksanaan minutasi perkara pidana sudah bersamaan dengan pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju, dan penyelesaian bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang muka belanja operasional kantor.

b. APM Pengadilan Negeri Tangerang

Pada Pengadilan Negeri Tangerang telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor W29.U4/301/KP.10.10/04/2019 tanggal 4 April 2019. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali dilakukan surveillance external Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri oleh Badan Peradilan Umum pada tanggal 07 Juli 2017 dengan mendapatkan predikat A (*Excellent*), kemudian pada tanggal 05 April 2019, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum melakukan Asesmen kembali di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang guna untuk mengevaluasi hasil surveillance sebelumnya dan memantau penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Pada asesmen ini, Pengadilan Negeri Tangerang berhasil mempertahankan predikat A (*Excellent*) dengan memperoleh nilai 700 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3007/DJU/SK/OT01.3/9/2019 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2019.

Adapun beberapa hal yang menjadi temuan/ketidaksesuaian dan telah ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu Jurusita belum menggunakan Template Relass dari Aplikasi SIPP, Adanya Penetapan Sidang yang terlambat sebanyak 62 Perkara, Adanya minutasi yang terlambat sebanyak 543 perkara, Adanya berkas banding yang belum dikirim sebanyak 33 perkara, Akses pengunjung belum dikelola dengan baik, Terdapat pegawai yang tidak menggunakan nametag dan seragam yang berlaku, Petugas PTSP belum sepenuhnya melakukan 3 S (Senyum, Salam, dan Sapa), dan pententuan responden baik IPK maupun IKM agar dikelola dengan baik.

c. APM Pengadilan Negeri Serang

Pada Pengadilan Negeri Serang telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019, di mana penunjukan terakhir pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor W29.U1/116/SK.KPN/KP.11.01/11/2019 tanggal 15 November 2019. Nilai surveillance pertama Pengadilan Negeri Serang sebesar 707 dengan akreditasi A (excellent) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017.

Pada tanggal 19 November 2019, Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk evaluasi secara berkala terkait program APM. Adapun beberapa hal yang menjadi temuan/ketidaksesuaian dan telah ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu pengadaan papan visual dan papan petunjuk arah untuk akses pengunjung sidang, update maklumat pelayanan, pengadaan banner tentang informasi ketepatan waktu pelayanan eraterang, perbaikan informasi jam pelayanan PTSP yang sudah pudar, perbaikan 5R di beberapa titik, pengadaan buku hakim pengawas bidang perdata, rapat internal perdata dan akrilik uraian tugas staf perdata, pengiriman berkas banding sudah sesuai SOP, dan minutasi berkas perkara.

d. Pengadilan Negeri Pandeglang

Pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019, di mana penunjukan terakhir pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang nomor W29.U2/101/KPN/SK/04.5/6/2019 tanggal 19 Juni 2019. Sebagai Pengadilan Negeri kelas II, penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Pandeglang di tahun 2019, yaitu dilaksanakan surveillance external oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan nilai 707 dengan predikat A (excellent). Selanjutnya dari hasil pelaksanaan surveillance ini pun telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kembali oleh Pengadilan Tingggi Banten pada tanggal 14 November 2019. Adapun beberapa hal yang menjadi temuan/ketidaksesuaian dan telah ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu pengadaan renovasi gedung kantor yang tertunda pembayarannya telah diajukan permohonan tambahan anggaran belanja modal untuk tunggakan TA.2017, pelaksanaan rapat evaluasi anggaran per triwulan, pembuatan jadwal perawatan peralatan dan mesin secara berkala, perbaikan pencatatan ATK pada aplikasi dan kartu kendali, pembuatan laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke KPKNL, kelengkapan data atas nama kantor dan tandatangan pada bukti pengeluaran/kuitansi.

e. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2019, di mana penunjukan terakhir pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung nomor W29-U3/2840/Kot.00.8/XI/2019 tanggal 12 November 2019. Sebagai Pengadilan Negeri kelas II, penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung di tahun 2019, yaitu dilaksanakan surveillance external oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan nilai 716 dengan

predikat A (excellent). Selanjutnya dari hasil pelaksanaan surveillance ini pun telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kembali oleh Pengadilan Tingggi Banten pada tanggal 13 November 2019. Adapun beberapa hal yang menjadi temuan/ketidaksesuaian dan telah ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu pembuatan SK tersendiri tentang Pembagian tugas pengawasan atasan langsung kepada jajaran di bawahnya, pembuatan dan penggunaan blangko Berita Acara Penyerahan Berkas perkara ke Kepaniteraan Hukum.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan. Tujuannnya mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai standar, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Penerapan PTSP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019.

Semua pengadilan di lingkungan Peradilan Umum wilayah Banten telah menerapkan PTSP. Adapun tampilan ruang/meja PTSP pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat pada gambar berikut :

PTSP PENGADILAN TINGGI BANTEN
Terdapat 2 (dua) bagian pelayanan, yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan. Serta telah disediakan meja inzage.

PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum dan umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.

PTSP PENGADILAN NEGERI SERANG

Terdapat 6 (enam) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu Tipikor, PHI, Pidana, Perdata, Hukum dan Umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan

PTSP PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan

PTSP PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court dan meja inzage.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan, 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Untuk meningkatkan kemampuan petugas PTSP dalam melayani masyarakat pencari keadilan, maka pada tanggal 29 November seluruh petugas PTSP di lingkungan peradilan umum wilayah Banten telah mengikuti Sosialisasi Pelayanan Prima pada PTSP yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tangerang, dimana diikuti pula oleh hampir seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tangerang.

PTSP pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 44/DJU/SK/Hm.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Ektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Saat ini, semua Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah menggunakan aplikasi PTSP+ dalam pengelolaan surat keluar dan surat masuk. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Banten sendiri, dikarenakan belum ada aplikasi resmi dari Ditjen Badilum untuk pengadilan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi Banten menggunakan aplikasi SIURAT yang merupakan inovasi dari Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun pembuatan surat keterangan yang sudah menggunakan eraterang pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	JUMLAH SURAT KETERANGAN TAHUN 2019	JUMLAH SURAT KETERANGAN MENGGUNAKAN ERATERANG TAHUN 2019
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	2978	2978
2.	Pengadilan Negeri Serang	1080	937
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	315	306
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	153	136

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan publik menjadi poin penting dalam implementasi program Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) dari Pemerintah sebab inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat dan sebagai tanda majunya suatu bangsa.

a. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/102/KPT/SK/KP.04.5/XII/2019 tangggal 5 Desember 2019 (terlampir). Beberapa inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, yaitu adanya e-PPID sebagai sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Banten, adanya meja inzage untuk pihak yang ingin memeriksa/ mempelajari berkas perkara dan telah tersedianya mesin / layar touchscreen IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang tersedia di dekat meja PTSP.

b. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tangerang

Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/189/KP.10.10/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk mendukung berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Zona Integritras sekaligus Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan inovasi pelayanan publik diantaranya :

- adanya akses pintu yang berbeda antara pegawai dan pengunjung sidang
- adanya pintu metal detector
- adanya Flap Barrier yang terdapat pada akses masuk dan keluar pengadilan
- pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
- seluruh Apartur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Tangerang membagian stiker bertuliskan Stop Korupsi

Komitmen Pengadilan Negeri Tangerang dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik pada akhirnya mengantarkan Pengadilan ini menerima apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh pemerintah pada tanggal 10 Desember 2019 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H. Tjahjo Kumulo SH.

c. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Serang

Inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2019, yaitu adanya mesin IKM harian. Di mana setiap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Serang memberikan penilaian atas layanan yang telah diberikan oleh petugas PTSP dengan menekan tombol yang terdapat dalam mesin IKM tersebut. Hal ini diperlukan sebagai evaluasi atas layanan yang diberikan serta untuk peningkatan layanan kepada pengguna layanan Pengadilan.

d. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang

Pada tanggal 25 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Pandeglang mengembangkan beberapa aplikasi inovasi untuk pelayanan publik dan untuk internal diantaranya adalah :

1) Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pandeglang adalah aplikasi antrian untuk pengunjung pengadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum, perdata, pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pengunjung untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.

I. Fitur Antrian PTSP

- Pengambilan nomor antrian
- Meja petugas PTSP
- Layar LCD/TV

II. Alur Proses Antrian PTSP Dapat Dilihat Gambar Berikut :

(Mengambil Nomor Antrian)

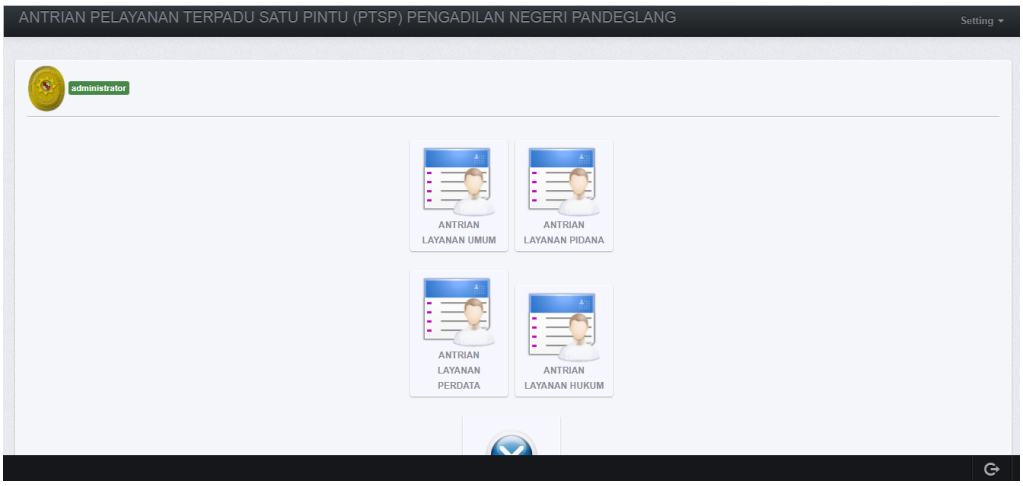

(Login Petugas PTSP)

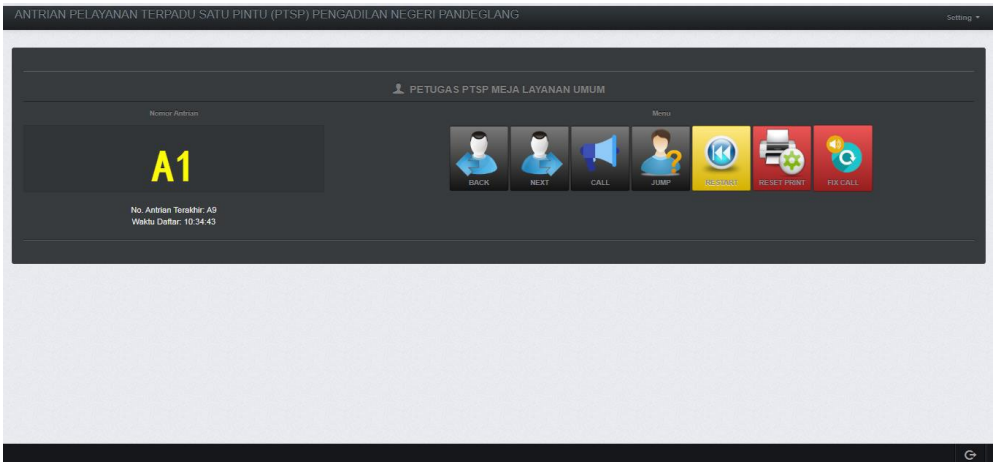

(Panggil Nomor Antrian)

(LCD Nomor Antrian)

2) Audio Anti Gratifikasi

Audio Anti Gratifikasi Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengumuman audio pengeras suara untuk publik mengenai anti gratifikasi dan memperingatkan pengunjung sidang agar tetap menjaga kebersihan di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang secara otomatis setiap 2 jam atau 1 jam sekali.

3) Survei IKM

Survei IKM Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian bagi pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Fitur Survei IKM :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Data Masyarakat Responden (Spk)
- Data Masyarakat Responden (Sipk).

4) Info Perkara dan Denda Tilang

Info Perkara dan Denda Tilang Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu bertujuan untuk mempermudah para pencari keadilan mencari informasi perkara jadwal sidang dan denda tilang.

I. Fitur Info Perkara Dan Denda Tilang
   - mencari info perkara
   - mencari info tilang

II. Alur Proses Info Perkara dan Denda Tilang dapat dilihat gambar berikut:

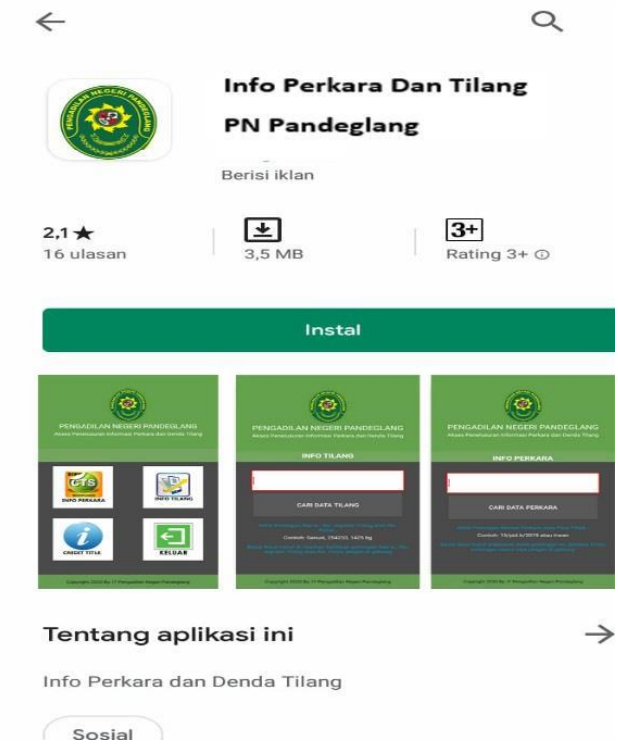

(Download di google playstore)

(Cari data denda tilang)

(Cari data perkara)

e. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Beberapa inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yaitu inovasi Pembayaran Biaya Perkara melalui kerjasama dengan BTN (Bank Tabungan Negara) dengan adanya fasilitas *mobile bank vehicle* yang tersedia di lingkungan gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, proses menjadi lebih cepat karena sebelumnya setiap pembayaran biaya perkara selalu dilakukan penyetoran langsung ke bank yang berjarak paling dekat 2km.

Lalu adanya inovasi SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP hanya dapat diakses masyarakat melalui jaringan internet, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dapat menggunakan layanan SMS ini untuk mengetahui informasi tentang parapihak, tanggal register, status terakhir, jadwal sidang dan juga biaya perkara.

BAB VI
PENGAWASAN

Pengawasan yaitu suatu upaya sistematis manajemen untuk melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefiktif dan seefiesien mungkin didalam mencapai tujuan.

Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

- Untuk menjaga terselenggaranya manajeman peradilan yang baik dan benar.
- Untuk menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan, dan tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai program kerja.
- Untuk menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- Untuk menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
- Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, disiplin dan prestasi kerja, guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

A. INTERNAL

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banten selain bertugas sebagai *voorprost* (kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten.Pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingggi Banten melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tinggi Banten ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang mengalami beberapa kali pergantian Hakim Pengawas selama tahun 2019, dan terakhir berdasarkan SK Nomor W29.U/100/KPT/SK/KP.10.10/XI/2019 tanggal 14 November 2019.

Pada tanggal 14 s.d Agustus 2019 pun telah dilaksanakan audit internal di Pengadilan Tinggi Banten. Dari hasil laporan audit Pengadilan Tinggi Banten tersebut semua ketidaksesuaian yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu target penyelesaiannya. Adapun hal-hal yang ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu telah dibentuk tim manajemen resiko, telah dilaksanakan monev terhadap jurusita di Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan delegasi, laporan/ berita acara penyerahan putusan pidana kepada panitera muda hukum, berdasarkan data di SIPP bahwa pelaksanaan minutasi perkara pidana sudah bersamaan dengan pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju, dan penyelesaian bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang muka belanja operasional kantor.

Pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi Banten juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Kegiatan Pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten semester pertama dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Juli 2019. Lalu pada semester kedua bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan asistensi dan audit eksternal/ surveillance, sebagai wujud dari implementasi akreditasi penjaminan mutu. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Yang di dalamnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Selain pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten, Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten juga telah berjalan dengan baik. Berikut ini dipaparkan pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten :

a. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1). Menegakkan Disiplin Kerja, dengan tujuan meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan, terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, bersih dan bebas dari KKN, terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2). Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi pada Pengadilan Negeri Tangerang terdiri dari Rapat koordinasi Hakim, seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang tersusun dalam jadwal rapat koordinasi.

3). Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor W.29.U4/834/KP.10.10/10/2019, tertanggal 09 Oktober 2019 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang.

b. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Serang

Audit Internal pada Pengadilan Negeri Serang dilaksanakan 2 kali selama tahun 2019 (pada tanggal 9 April 2019 dan 2 September 2019), audit dilaksanakan di setiap bagian di Pengadilan Negeri Serang, baik bagian Kesekretariatan maupun kepaniteraan.

Secara ringkas, beberapa hal yang menjadi temuan pada audit internal pertama dan telah ditindaklanjuti, yaitu mengenai pelaporan LHKPN, minutasi perkara cepat, pembuatan berita acara sebelum sidang berikutnya, pembuatan penetapan sidang secara tertulis apabila JPU tidak hadir, pengisian buku register perdata yang harus sesuai SIPP, penugasan jurusita, informasi biaya perkara, penggunaan barcode dalam tingkat kasasi dan PK, pengisian penundaan sidang di aplikasi SIPP, pengiriman bundel A dan bundel B, pembuatan uraian tugas di meja pegawai, daftar barang ruangan, transparansi RKAKL, jaringan internet, pengisian

sikep, pembuatan kontrak kantin, penyediaan kitab suci di ruang sidang, pengaktifan kilinik dan kebersihan.

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi temuan pada audit internal pertama dan telah ditindaklanjuti, yaitu mengenai pelaporan LHKPN, pembuatan kontrak kantin, Daftar Barang Ruangan, Label BMN, Pengusulan Jabatan dan Pensiun, update Daftar Urut Kepangkatan, proses pencairan biaya panggilan di kasir, pengiriman berkas banding dan pengisian penundaan sidang di aplikasi SIPP.

Selain Audit Internal, dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pengawas Penegakan disiplin kerja pegawai dengan tugas :

- Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan;
- Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menentukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan.

c. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Pandeglang

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

1). Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
   - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut;
   - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai;
   - Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2). Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita / Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

3). Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

4). Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai.

5). Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

d. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

- Rapat Koordinasi

  Rapat koordinasi pada Pengadilan Negeri Tangerang terdiri dari Rapat koordinasi Hakim, seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang tersusun dalam jadwal rapat koordinasi.

- Pengawasan

  Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi setiap bidang dengan SK nomor : W29-U3/87/KOT.00.08/I/2019 tanggal 8 januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten, didapatkan hasil terkait informasi dan pengaduan sebagai berikut:

Tabel Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2019

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Sisa pengaduan Tahun 2019	-
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2019	6
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	5
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	-
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	1
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi	-
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	-
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2019	-
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin	-

Tabel Rekapitulasi Data Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten Tahun 2019

No.	Satker	Jumlah Layanan Informasi	Jumlah Layanan Pengaduan
1	PT Banten	24	6
2	PN Tangerang	51	2
3	PN Serang	1823	-
4	PN Pandeglang	5	-
5	PN Rangkasbitung	19	-
Jumlah		**1922**	**8**

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Pengadilan Tinggi Banten pun telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut asistensi/surveillance ke Pengadilan Negeri Tangerang, Serang, Pandeglang dan Rangkasbitung, yaitu pada tanggal 12, 13, 14 dan 19 November 2019, di mana hasilnya bahwa semua temuan dan rekomendasi telah ditindaklanjuti.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing- masing satuan kerja yang ada dalam wilayah Pengadilan Banten di tahun 2019, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu antara lain :

1. Secara umum bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengelolaan Administrasi Perkara dan Adminsitrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, terutama menyangkut peningkatan kinerja para pegawai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
2. Implementasi e-court dan SIPP di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah berjalan baik dan didukung oleh sarana teknologi informasi yang cukup memadai, namun masih perlu peningkatan kinerja untuk meningkatkan nilai kepatuhan pengisian data SIPP yang termonitoring melalui aplikasi MIS (Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP).
3. Pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu berusaha untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan demi peningkatan pelayanan publik. Program ini menjadi pendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Peradilan, baik internal sauan kerja maupun pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Banten.
4. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan peradilan menjadi perhatian utama semua satuan kerja Peradilan Umum sewilayah Banten. Program ini selalu disempurnakan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.
5. Pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi nilai tambah masing-masing Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sewilayah Banten dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Setiap satuan kerja berlomba memberikan dedikasinya dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten sehingga dapat melaksanakan fungsi peradilan dan pelayanan publik yang terbaik, maka rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Penambahan tenaga pelaksana/ staf administrasi bagi Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten mendesak untuk dipenuhi, beberapa diantaranya untuk kebutuhan staf administrasi perkara, arsiparis, pustakawan dan penata laporan.
2. Perlunya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas 3. pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana, diantaranya untuk renovasi gedung Pengadilan Tinggi Banten agar dapat mewujudkan satu akses bagi publik hanya ke PTSP, renovasi rumah dinas hakim, lahan parkir untuk gedung Pengadilan Negeri Serang karena area parkir yang ada sekarang tidak mencukupi sehingga tidak tertata rapi dan pengadaan sarana / prasarana terutama yang menunjang pelayanan publik dalam hal PTSP, E-court dan SIPP.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Tinggi Banten ini, semoga segala kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat segera teratasi dengan adanya tindaklanjut dari mahkamah Agung.

LAMPIRAN :

1. Laporan Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banten
2. Laporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Banten
3. Laporan Keadaan Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Banten
4. Data Stistik Perkara SIPP sewilayah Pengadilan Tinggi banten
5. SK Penunjukan Tim APM Pengadilan Tinggi Banten
6. SK Penunjukan Tim Pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Banten

Mbak Yeni

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang

LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA
TAHUN 2019

NO.	PERKARA MASUK	NAMA MAJELIS	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM	TANGGAL PUTUSAN	SISA AKHIR BULAN BELUM DIBAGI	SISA AKHIR BULAN BELUM DIPUTUS	SISA AKHIR BULAN BELUM DIMINUTIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	No.152/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D3	9.11.2018	13.11.2018	10.1.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
2	No.154/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D7	14.11.2018	14.11.2018	23.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
3	No.155/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D6	14.11.2018	14.11.2018	8.1.2019				
	Harta Warisan (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
4	No.156/PDT/2018/PT.BTN	C5.C18.C19.D1	21.11.2018	22.11.2018	21.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Membatalkan)				
5	No.157/PDT/2018/PT.BTN	B1.C6.C8.D2	22.11.2018	22.11.2018	23.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
6	No.158/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D8	22.11.2018	23.11.2018	24.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
7	No.159/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D6	22.11.2018	27.11.2018	15.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
8	No.160/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C14.D4	23.11.2018	27.11.2018	23.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
9	No.161/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D5	23.11.2018	27.11.2018	17.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
10	No.162/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D3	26.11.2018	28.11.2018	21.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
11	No.163/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D10	26.11.2018	28.11.2018	28.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
12	No.164/PDT/2018/PT.BTN	C5.C18.C19.D10	27.11.2018	28.11.2018	17.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
13	No.165/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D8	27.11.2018	29.11.2018	17.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
14	No.166/PDT/2018/PT.BTN	C5.C18.C19.D6	28.11.2018	29.11.2018	21.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
15	No.167/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D11	29.11.2018	29.11.2018	23.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
16	No.168/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D1	30.11.2018	6.12.2018	7.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Membatalkan)				
17	No.169/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D2	5.12.2018	6.12.2018	06.03.19				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Membatalkan)				
18	No.170/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D5	5.12.2018	6.12.2018	28.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
19	No.171/PDT/2018/PT.BTN	C5.C18.C19.D3	7.12.2018	7.12.2018	29.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
20	No.172/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D4	10.12.2018	13.12.2018	20.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
21	No.173/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D10	10.12.2018	11.12.2018	19.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
22	No.174/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D9	12.12.2018	11.12.2018	8.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
23	No.175/PDT/2018/PT.BTN	C6.C8.C22.D11	12.12.2018	13.12.2018	7.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Memperbaiki)				
24	No.176/PDT/2018/PT.BTN	C3.C10.C15.D5	19.12.2018	19.12.2018	20.2.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
25	No.177/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D2	19.12.2018	19.12.2018	28.1.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
26	No.178/PDT/2018/PT.BTN	C1.C12.C13.D3	28.12.2018	28.12.2018	27.03.19				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
27	No.179/PDT/2018/PT.BTN	C2.C7.C13.D7	31.12.2018	3.1.2019	31.1.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Memperbaiki)				
28	No.180/PDT/2018/PT.BTN	C4.C16.C17.D6	31.12.2018	3.1.2019	19.2.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
1	No. 1/PDT/2019/PT.BTN	C1.C12.C14.D12	3.1.2019	3.1.2019	21.03.19				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Memperbaiki)				

Ketua : A
DR. HJ. SRI SUTATIEK, SH., M.Hum.

Wakil Ketua : B
DR. H. NARDIMAN, S.H.,M.H.

C
1 ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H
2 BENAR KAROKARO, S.H., M.H
3 AMRIDIN, S.H., M.H
4 DANIEL RIMPAN, S.H
5 IERSYAF, S.H.
6 MASRUDIN CANIAGO, S.H., MH
7 SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.
8 DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.
9 T.H. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.
10 AGUS HERJONO, S.H
11 MEGA BOEANA, S.H
12 SITI FARIDA MT., S.H., M.H.
13 HARTADI, SH., M.H.
14 H. ERLIN HERMANTO, SH.,M.H.
15 ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H
16 H. FERI FERDIAMAN, S.H., M.H
17 Dr. WAHIDIN, S.H., M.Hum
18 MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.H
19 MARIANA S. PANJAITAN, SH.,MH
20 DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H., M.H., CN
21 EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H
22 M. SY. ENDI, SH.MH

Panitera : D
NETTI SRININGSIH, SH., M.SI
1 H. SUNIYANTA, SH
2 AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH
3 IDHAM CHOLIQ, SH. MH
4 WILAN WITARSIH, SH.
5 SITI SUSILAWATI, SH
6 ITAIDA LAMTIUR P, SH
7 YANTO BUDIANTO, SH
8 PATUAN SIMANJUNTAK, SH., MH.
9 IDRIS AWALUDDIN, SH.,MH
10 SUTISNA, SH
11 CHRISTANTO PUDJIONO, SH., MH

2	No. 2/PDT/2019/PT.BTN	C2.C7.C13.D9	15.1.2019	22.1.2019	26.2.2019			
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)			
3	No. 3/PDT/2019/PT.BTN	C4.C16.C17.D2	15.1.2019	22.1.2019	04.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
4	No. 4/PDT/2019/PT.BTN	C5.C18.C19.D5	16.1.2019	22.1.2019	19.2.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Membatalkan)			
5	No. 5/PDT/2019/PT.BTN	C6.C8.C22.D4	17.1.2019	22.1.2019	21.2.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
6	No. 6/PDT/2019/PT.BTN	C5.C18.C19.D3	17.1.2019	22.1.2019	11.03.19			
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
7	No. 7/PDT/2019/PT.BTN	C2.C7.C13.D11	17.1.2019	22.1.2019	25.2.2019			
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
8	No. 8/PDT/2019/PT.BTN	C4.C16.C17.D10	18.1.2019	22.1.2019	27.2.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
9	No. 9/PDT/2019/PT.BTN	C3.C10.C15.D8	21.1.2019	22.1.2019	27.2.2019			
	Tanah (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)			
10	No. 10/PDT/2019/PT.BTN	C3.C10.C15.D7	21.1.2019	22.1.2019	02.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
11	No. 11/PDT/2019/PT.BTN	C6.C8.C22.D6	22.1.2019	22.1.2019	21.03.2019			
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Memperbaiki)			
12	No. 12/PDT/2019/PT.BTN	C2.C7.C13.D12	23.1.2019	22.1.2019	26.02.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
13	No. 13/PDT/2019/PT.BTN	C4.C16.C17.D9	23.1.2019	22.1.2019	25.02.2019			
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
14	No. 14/PDT/2019/PT.BTN	C5.C18.C19.D4	30.1.2019	31.1.2019	25.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
15	No. 15/PDT/2019/PT.BTN	C6.C8.C22.D11	31.1.2019	31.1.2019	29.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
16	No. 16/PDT/2019/PT.BTN	C2.C23.C14.D2	31.1.2019	31.1.2019	27.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
17	No. 17/PDT/2019/PT.BTN	C3.C10.C15.D5	1.2.2019	1.2.2019	11.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
18	No. 18/PDT/2019/PT.BTN	C3.C10.C15.D3	1.2.2019	1.2.2019	08.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan			
19	No. 19/PDT/2019/PT.BTN	C4.C16.C17.D10	4.2.2019	4.2.2019	25.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
20	No. 20/PDT/2019/PT.BTN	C5.C18.C19.D8	18.2.2019	18.2.2019	28.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
21	No. 21/PDT/2019/PT.BTN	C6.C8.C22.D4	18.2.2019	18.2.2019	15.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
22	No. 22/PDT/2019/PT.BTN	C7.C8.C18.D11	19.2.2019	19.2.2019	27.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
23	No. 23/PDT/2019/PT.BTN	C17.C6.C22.D7	19.2.2019	19.2.2019	01.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
24	No. 24/PDT/2019/PT.BTN	C12.C3.C13.D6	20.2.2019	20.2.2019	02.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
25	No. 25/PDT/2019/PT.BTN	C10.C2.C19.D12	21.2.2019	21.2.2019	25.03.19			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
26	No. 26/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C23.D13	06.03.2019	08.03.2019	11.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
27	No. 27/PDT/2019/PT.BTN	C5.C15.C16.D8	06.03.2019	08.03.2019	09.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
28	No. 28/PDT/2019/PT.BTN	C12.C3.C13.D6	08.03.2019	13.03.2019	10.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
29	No. 29/PDT/2019/PT.BTN	C8.C1.C7.D9	11.03.2019	13.03.2019	09.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Memperbaiki)			
30	No. 30/PDT/2019/PT.BTN	C2.C10.C19.D7	11.03.2019	22.03.2019	10.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
31	No. 31/PDT/2019/PT.BTN	C19.C2.C10.D5	13.03.2019	22.03.2019	22.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
32	No. 32/PDT/2019/PT.BTN	C13.C3.C12.D10	13.03.2019	22.03.2019	23.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
33	No. 33/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.D8.C7	18.03.2019	22.03.2019	15.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			
34	No. 34/PDT/2019/PT.BTN	C7.C18.C8.D4	18.03.2019	22.03.2019	29.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Membatalkan)			
35	No. 35/PDT/2019/PT.BTN	C16.C15.C5.D7	18.03.2019	22.03.2019	30.04.2019			
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)			

Ketua : **A**

H. HARYANTO, SH.,MH

Wakil Ketua : **B**

H. SUDIYATNO, SH.,MH

C

1. **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H**
2. **BENAR KAROKARO, S.H., M.H**
3. **AMRIDDIN, S.H., M.H**
4. **DANIEL RIMPAN, S.H**
5. **IERSYAF, S.H.**
6. **MASRUDIN CANIAGO, S.H., MH**
7. **DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.**
8. **MUHAMMAD NURZAMAN, SH.,MH**
9. **HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH**
10. **AGUS HERDJONO, SH.,MH**
11. **MARIANA S.M PANJAITAN, SH.,MH**
12. **SITI FARIDA MT, SH.,MH**
13. **HARTADI, SH.,MH**
14. **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**
15. **BUDI HAPSARI, SH.,MH**
16. **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.,MH**
17. **H. FERI FARDIAMAN, SH.,MH**
18. **DR. WAHIDIN, SH.,Mhum**
19. **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH**
20. **SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH**
21. **SOLAHUDDIN, SH.,MH**
22. **DR. BINSAR GULTOM, SH.,SE.,MH**
23. **KUSRIYANTO, SH.,Mhum**
24. **H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH**
25. **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,Mhum**

27. **ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH**
28. **UMBU JAMA, SH**

Panitera : **D**

NETTI SRININGSIH, SH., M.SI

1. **H. SUNIYANTA, SH**
2. **AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH**
3. **IDHAM CHOLIQ, SH. MH**
4. **WILAN WITARSIH, SH.**
5. **SITI SUSILAWATI, SH**
6. **ITAIDA LAMTIUR P, SH**
7. **YANTO BUDIANTO, SH**
8. **PATUAN SIMANJUNTAK, SH., MH.**
9. **IDRIS AWALUDDIN, SH.,MH**
10. **SUTISNA, SH**
11. **CHRISTANTO PUDJIONO, SH., MH**
12. **POEDJI RAHARDJO, SH**
13. **TRI WIDODO, SH.,MH**
14. **BASRIDA MURNI, SH**
15. **NURFUAD, SH**
16. **UDING SAEFUDIN, SH**

Rekapitulasi Perkara :

1	Sisa Tahun Lalu	28
2	Masuk Bulan Ini	164
3	Putus	171
4	Cabut Banding	0
5	Sisa Akhir	21
	a. Sudah dibagi	
	b. Belum dibagi	
6	Sisa Belum Diminutasi	

36	No. 36/PDT/2019/PT.BTN	C22.C17.C6.D6	19.03.2019	22.03.2019	02.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
37	No. 37/PDT/2019/PT.BTN	C17.C6.C22.D7	20.03.2019	22.03.2019	08.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
38	No. 38/PDT/2019/PT.BTN	C5.C15.C16.D8	25.03.2019	28.03.2019	09.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
39	No. 39/PDT/2019/PT.BTN	C4.C16.C17.D10	26.03.2019	28.03.2019	22.04.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
40	No. 40/PDT/2019/PT.BTN	C6.C8.C22.D4	26.03.2019	28.03.2019	29.04..2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
41	No. 41/PDT/2019/PT.BTN	C15.C5.C16.D1	01.04.2019	04.04.2019	30.04.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Memperbaiki)				
42	No. 42/PDT/2019/PT.BTN	C6.C17.C22.D2	02.04.2019	04.04.2019	08.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
43	No. 43/PDT/2019/PT.BTN	C8.C1.C7.D9	15.04.2019	15.04.2019	09.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
44	No. 44/PDT/2019/PT.BTN	C2.C10.C19.D15	15.04.2019	15.04.2019	13.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
45	No. 45/PDT/2019/PT.BTN	C3.C12.C13.D13	15.04.2019	15.04.2019	14.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
46	No. 46/PDT/2019/PT.BTN	C1.C7.C8.D13	22.04.2019	22.04.2019	23.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
47	No. 47/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C23.D15	22.04.2019	25.04.2019	23.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Memperbaiki)				
48	No. 48/PDT/2019/PT.BTN	C5.C15.C16.D5	22.04.2019	25.04.2019	21.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
49	No. 49/PDT/2019/PT.BTN	C12.C3.C13.D8	23.04.2019	25.04.2019	20.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
50	No. 50/PDT/2019/PT.BTN	C6.C17.C22.D8	23.04.2019	25.04.2019	13.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
51	No. 51/PDT/2019/PT.BTN	C10.C2.C18.D5	30.04.2019	02.05.2019	16.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
52	No. 52/PDT/2019/PT.BTN	C7.C1.C17.D2	02.05.2019	02.05.2019	20.05.2019				
	Tanah (Peusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
53	No. 53/PDT/2019/PT.BTN	C12.C11.C3.D9	03.05.2019	07.05.2019	20.05.2019				
	Cerai (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
54	No. 54/PDT/2019/PT.BTN	C22.C4.C13.D10	03.05.2019	07.05.2019	27.05.2019				
	Pembatalan Perkawinan (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
55	No. 55/PDT/2019/PT.BTN	C15.C5.C14.D3	03.05.2019	07.05.2019	21.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
56	No. 56/PDT/2019/PT.BTN	C21.C6.C16.D16	06.05.2019	07.05.2019	17.06.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
57	No. 57/PDT/2019/PT.BTN	C1.C8.C17.D14	07.05.2019	07.05.2019	28.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
58	No. 58/PDT/2019/PT.BTN	C18.C2.C10.D13	13.05.2019	13.05.2019	31.05.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
59	No. 59/PDT/2019/PT.BTN	C3.C11.C12.D16	13.05.2019	13.05.2019	11.06.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
60	No. 60/PDT/2019/PT.BTN	B.C1.C7.D7	13.05.2019	13.05.2019	12.07.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
61	No. 61/PDT/2019/PT.BTN	C13.C4.C22.D4	14.05.2019	14.05.2019	18.06.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
62	No. 62/PDT/2019/PT.BTN	C14.C5.C15.D11	14.05.2019	14.05.2019	11.06.2019				
	Tanah (Peusahaan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
63	No. 63/PDT/2019/PT.BTN	C4.C13.C22.D6	17.05.2019	17.05.2019	18.06.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
64	No. 64/PDT/2019/PT.BTN	C5.C11.C4.D5	17.05.2019	17.05.2019	13.06.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
65	No. 65/PDT/2019/PT.BTN	C3.C7.C17.D16	20.05.2019	20.05.2019	20.06.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
66	No. 66/PDT/2019/PT.BTN	C6..C16.C21.D13	20.05.2019	20.05.2019	25.06.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
67	No. 67/PDT/2019/PT.BTN	C11.C3.C12.D3	24.05.2019	27.05.2019	27.06.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
68	No. 68/PDT/2019/PT.BTN	C2.C10.C18.D15	27.05.2019	27.05.2019	18.06.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
69	No. 69/PDT/2019/PT.BTN	C13.C 4.C22.D4	29.05.2019	29.05.2019	27.06.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				

70	No. 70/PDT/2019/PT.BTN	C23.C24.C25.D14	29.05.2019	29.05.2019	27.06.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
71	No. 71/PDT/2019/PT.BTN	C7.C21.C10.D12	13.06.2019	13.06.2019	05.07.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
72	No. 72/PDT/2019/PT.BTN	C8.C22.C23.D1	13.06.2019	13.06.2019	22.07.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
73	No. 73/PDT/2019/PT.BTN	C2.C11.C12.D2	17.06.2019	17.06.2019	11.07.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
74	No. 74/PDT/2019/PT.BTN	C3.C13.C14.D9	18.06.2019	18.06.2019	24.07.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
75	No. 75/PDT/2019/PT.BTN	C3.C13.C14.D10	18.06.2019	18.06.2019	11.07.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
76	No. 76/PDT/2019/PT.BTN	C4.C15.C16.D9	02.07.2019	02.07.2019	29.07.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
77	No. 77/PDT/2019/PT.BTN	C5.C17.C18.D10	02.07.2019	02.07.2019	31.07.2019				
	Ganti Rugi (Perusahaan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
78	No. 78/PDT/2019/PT.BTN	C1.C9.C10.D4	04.07.2019	04.07.2019	01.08.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
79	No. 79/PDT/2019/PT.BTN	C6.C19.C20.D7	04.07.2019	04.07.2019	25.07.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
80	No. 80/PDT/2019/PT.BTN	C21.C7.C10.D13	10.07.2019	10.07.2019	23.07.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
81	No. 81/PDT/2019/PT.BTN	C22.C8.C23.D9	10.07.2019	10.07.2019	02.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
82	No. 82/PDT/2019/PT.BTN	C12.C2.C11.D5	10.07.2019	10.07.2019	22.08.2019				
	Lain-lain (Perorangan Lawan Perorangan)				Dikuatkan				
83	No. 83/PDT/2019/PT.BTN	C16.C15.C4.D15	23.07.2019	23.07.2019	20.08.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
84	No. 84/PDT/2019/PT.BTN	C18.C17.C5.D6	23.07.2019	23.07.2019	25.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
85	No. 85/PDT/2019/PT.BTN	C14.C3.C13.D14	24.07.2019	24.07.2019	26.08.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Diperbaiki				
86	No. 86/PDT/2019/PT.BTN	C10.C1.C9.D3	25.07.2019	25.07.2019	20.08.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perusahaan)				Dikuatkan				
87	No. 87/PDT/2019/PT.BTN	C7.C21.C10.D9	25.07.2019	25.07.2019	15.08.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
88	No. 88/PDT/2019/PT.BTN	C20.C6.C19.D10	25.07.2019	25.07.2019	22.08.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perusahaan)				Dikuatkan				
89	No. 89/PDT/2019/PT.BTN	C2.C11.C12.D8	12.08.2019	12.08.2019	03.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
90	No. 90/PDT/2019/PT.BTN	C4.C15.C16.D4	12.08.2019	12.08.2019	04.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
91	No. 91/PDT/2019/PT.BTN	C13.C14.C3.D13	12.08.2019	12.08.2019	04.09.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				Tidak Diterima				
92	No. 92/PDT/2019/PT.BTN	C8.C22.C23.D16	12.08.2019	12.08.2019	25.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				Membatalkan				
93	No. 93/PDT/2019/PT.BTN	C19.C6.C20.D2	14.08.2019	14.08.2019	05.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
94	No. 94/PDT/2019/PT.BTN	C1.C9.C10.D14	22.08.2019	22.08.2019	26.09.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
95	No. 95/PDT/2019/PT.BTN	C21.C7.C10.D5	26.08.2019	27.08.2019	18.09.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perusahaan)				Menguatkan				
96	No. 96/PDT/2019/PT.BTN	C12.C2.C11.D15	27.08.2019	27.08.2019	16.09.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
97	No. 97/PDT/2019/PT.BTN	C14.C3.C13.D8	27.08.2019	27.08.2019	17.09.2019				
	Lain - lain (Perorangan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
98	No. 98/PDT/2019/PT.BTN	C4.C15.C16.D6	27.08.2019	27.08.2019	17.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
99	No. 99/PDT/2019/PT.BTN	C6.C19.C20.D16	02.09.2019	03.09.2019	02.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
100	No. 100/PDT/2019/PT.BTN	C10.C1.C9.D10	02.09.2019	03.09.2019	18.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Membatalkan				
101	No. 101/PDT/2019/PT.BTN	C17.C5.C18.D13	02.09.2019	03.09.2019	25.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
102	No. 102/PDT/2019/PT.BTN	C22.C8.C23.D3	02.09.2019	03.09.2019	25.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
103	No. 103/PDT/2019/PT.BTN	C7.C21.C10.D4	03.09.2019	03.09.2019	23.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				

104	No. 104/PDT/2019/PT.BTN	C2.C11.C12.D14	05.09.2019	05.09.2019	26.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
105	No. 105/PDT/2019/PT.BTN	C3.C13.C14.D16	05.09.2019	05.09.2019	25.09.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				Menguatkan				
106	No. 106/PDT/2019/PT.BTN	C16.C4.C15.D5	11.09.2019	16.09.2019	09.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
107	No. 107/PDT/2019/PT.BTN	C20.C6.C23.D7	16.09.2019	17.09.2019	31.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
108	No. 108/PDT/2019/PT.BTN	C5.C17.C18.D9	17.09.2019	17.09.2019	03.10.2019				
	Jual Beli (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
109	No. 109/PDT/2019/PT.BTN	C8.C10.C23.D7	17.09.2019	17.09.2019	06.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
110	No. 110/PDT/2019/PT.BTN	C1.C9.C10.D3	17.09.2019	17.09.2019	22.10.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
111	No. 111/PDT/2019/PT.BTN	C21.C7.C22.D15	20.09.2019	23.09.2019	03.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
112	No. 112/PDT/2019/PT.BTN	C10.C12.C2.D1	23.09.2019	24.09.2019	17.10.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
113	No. 113/PDT/2019/PT.BTN	C4.C15.C16.D14	23.09.2019	24.09.2019	23.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
114	No. 114/PDT/2019/PT.BTN	C18.C5.C17.D10	23.09.2019	24.09.2019	14.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Membatalkan)				
115	No. 115/PDT/2019/PT.BTN	C13.C3.C14.D13	25.09.2019	25.09.2019	17.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
116	No. 116/PDT/2019/PT.BTN	C8.C10.C23.D4	25.09.2019	25.09.2019	17.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
117	No. 117/PDT/2019/PT.BTN	C10.C1.C9.D16	30.09.2019	30.09.2019	22.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
118	No. 118/PDT/2019/PT.BTN	C19.C6.C20.D5	01.10.2019	01.10.2019	31.10.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
119	No. 119/PDT/2019/PT.BTN	B.C21.C22.D2	01.10.2019	01.10.2019	18.11.2019				
	Tanah (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
120	No. 120/PDT/2019/PT.BTN	C12.C2.C22.D6	01.10.2019	03.10.2019	11.11.2019				
	Tanah (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
121	No. 121/PDT/2019/PT.BTN	C15.C4.C16.D3	02.10.2019	03.10.2019	29.10.2019				
	Wanprestasi (Perorangan Lawan Perorangan)				menguatkan				
122	No. 122/PDT/2019/PT.BTN	C3.C13.C14.D11	07.10.2019	09.10.2019	31.10.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				menguatkan				
123	No. 123/PDT/2019/PT.BTN	A.C13.C16.D5	15.10.2019	15.10.2019	19.11.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
124	No. 124/PDT/2019/PT.BTN	C17.C5.C18.D7	15.10.2019	15.10.2019	14.11.2019				
	Hak Asuh Anak (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
125	No. 125/PDT/2019/PT.BTN	C21.C8.C23.D9	15.10.2019	15.10.2019	18.11.2019				
	Lain - lain (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
126	No. 126/PDT/2019/PT.BTN	C1.C9.C10.D9	21.10.2019	21.10.2019	27.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
127	No. 127/PDT/2019/PT.BTN	C6.C19.C20.D14	28.10.2019	28.10.2019	19.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
128	No. 128/PDT/2019/PT.BTN	C6.C18.C19.D10	04.11.2019	05.11.2019	12.12.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Membatalkan)				
129	No. 129/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C15.D13	04.11.2019	05.11.2019	26.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Memperbaiki)				
130	No. 130/PDT/2019/PT.BTN	C5.C16.C20.D1	04.11.2019	05.11.2019	28.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
131	No. 131/PDT/2019/PT.BTN	C5.C16.C20.D1	04.11.2019	05.11.2019	19.11.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
132	No. 132/PDT/2019/PT.BTN	C12.C3.C13.D4	04.11.2019	05.11.2019	28.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
133	No. 133/PDT/2019/PT.BTN	C2.C21.C11.D12	04.11.2019	05.11.2019	28.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
134	No. 134/PDT/2019/PT.BTN	C8..C9.C20.D15	04.11.2019	05.11.2019	28.11.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
135	No. 135/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C15.D2	04.11.2019	05.11.2019			No. 135/PDT/2019/PT.BTN		
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)								
136	No. 136/PDT/2019/PT.BTN	C23.C18.C11.D9	08.11.2019	08.11.2019	26.11.2019				
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
137	No. 137/PDT/2019/PT.BTN	C3.C14.C26.D5	08.11.2019	08.11.2019	26.11.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				

138	No. 138/PDT/2019/PT.BTN	C6.C28.C9.D11	11.11.2019	11.11.2019	02.12.2019				
	Harta Bersama (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
139	No. 139/PDT/2019/PT.BTN	C7.C20.C24.D7	11.11.2019	11.11.2019	10.12.2019				
	Tanah (Perorangan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
140	No. 140/PDT/2019/PT.BTN	C12.C21.C25.D16	11.11.2019	12.11.2019	04.12.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
141	No. 141/PDT/2019/PT.BTN	C2.C13.C15.D14	11.11.2019	18.11.2019	10.12.2019				
	Pembatalan Perceraian (Perceraian Lawan perorangan)				(Menguatkan)				
142	No. 142/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C15.D3	11.11.2019	18.11.2019			142/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
143	No. 143/PDT/2019/PT.BTN	C5.C27.C22.D6	11.11.2019	18.11.2019	17.12.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
144	No. 144/PDT/2019/PT.BTN	C14.C3.C26.D13	18.11.2019	19.11.2019			144/PDT/2019/PT.BTN		
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)								
145	No. 145/PDT/2019/PT.BTN	C12.C21.C25.D10	20.11.2019	20.11.2019	13.12.2019				
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)				(Menguatkan)				
146	No. 146/PDT/2019/PT.BTN	C28.C6.C9.D15	25.11.2019	25.11.2019			146/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
147	No. 147/PDT/2019/PT.BTN	C13.C2.C15.D11	25.11.2019	25.11.2019	10.12.2019				
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)				(Menguatkan)				
148	No. 148/PDT/2019/PT.BTN	C20.C7.C24.D1	25.11.2019	25.11.2019			148/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
149	No. 149/PDT/2019/PT.BTN	C5.C27.C22.D12	28.11.2019	28.11.2019			149/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
150	No. 150/PDT/2019/PT.BTN	C6.C18.C19.D10	02.12.2019	02.12.2019			150/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
151	No. 151/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C15.D2	03.12.2019	03.12.2019			151/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
152	No. 152/PDT/2019/PT.BTN	C6.C28.C9.D11	10.12.2019	10.12.2019			152/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
153	No. 153/PDT/2019/PT.BTN	C7.C20.C24.D7	10.12.2019	10.12.2019			153/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
154	No. 154/PDT/2019/PT.BTN	C12.C21.C25.D16	17.12.2019	17.12.2019			154/PDT/2019/PT.BTN		
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)								
155	No. 155/PDT/2019/PT.BTN	C2.C13.C15.D14	17.12.2019	17.12.2019			155/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
156	No. 156/PDT/2019/PT.BTN	C4.C14.C15.D3	18.12.2019	18.12.2019			156/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
157	No. 157/PDT/2019/PT.BTN	C5.C27.C22.D6	18.12.2019	18.12.2019			157/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
158	No. 158/PDT/2019/PT.BTN	C14.C3.C26.D13	19.12.2019	19.12.2019			158/PDT/2019/PT.BTN		
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)								
159	No. 159/PDT/2019/PT.BTN	C12.C21.C25.D10	23.12.2019	23.12.2019			159/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perusahaan)								
160	No. 160/PDT/2019/PT.BTN	C28.C6.C9.D15	23.12.2019	23.12.2019			160/PDT/2019/PT.BTN		
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)								
161	No. 161/PDT/2019/PT.BTN	C13.C2.C15.D11	23.12.2019	23.12.2019			161/PDT/2019/PT.BTN		
	Wanprestasi (Perusahaan Lawan Perorangan)								
162	No. 162/PDT/2019/PT.BTN	C20.C7.C24.D1	23.12.2019	23.12.2019			162/PDT/2019/PT.BTN		
	Perceraian (Perorangan Lawan Perorangan)								
163	No. 163/PDT/2019/PT.BTN	C5.C27.C22.D12	23.12.2019	23.12.2019			163/PDT/2019/PT.BTN		
	Perbuatan Melawan Hukum (Perorangan Lawan Perorangan)								
164	No. 164/PDT/2019/PT.BTN	C28.C6.C9.D15	23.12.2019	23.12.2019			164/PDT/2019/PT.BTN		
	Tanah (Perorangan Lawan Perorangan)								

Mengetahui,
PANITERA MUDA PERDATA

PRIEDJI RAHARDJO, SH

Serang, 31 Desember 2019
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN

TUTI ALAWIYAH, SE

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6
S E R A N G

Formulir LII - B1

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK
BULAN : JANUARI-DESEMBER TAHUN : 2019

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C2. D1	04.01.2019	07.01.2019	**22.01.2019**				
2	2/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C3. C4. C5. D14	12.06.2019	12.06.2019	**24.06.2019**				
3	3/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C4. C5. C6. D6	11.09.2019	11.09.2019	**18.09.2019**				
4	4/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C3. C6. C5. D8	05.11.2019	05.11.2019	**20.11.2019**				
5	5/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C2. C4. C10. D7	26.11.2019	26.11.2019	**05.12.2019**				
6	6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN	C11. C12. C13. D16	18.12.2019	18.12.2019			6/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BTN		

Susunan Majelis Tahun 2018 s.d Maret 2019 :

Ketua : Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH., M.Hum. (A)
Wk. Ketua : Dr. H. NARDIMAN. SH.,MH (B)
Hakim Anggota
1. ABDUL HAMID PATTI RADJA, S.H
2. DORTIANNA PARDEDE, SH.,M
3. SITI FARIDA MT, SH.,MH
4. MUHAMMAD NURZAMAN, SH.,

Panitera Pengganti :
NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si
1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.
3. Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.
4. IDHAM CHOLIQ, S.H.
5. WILAN WITARSIH, S.H.
6. SITI SUSILAWATI, S.H.
7. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
9. PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.
10. IDRIS AWALUDDIN, SH
11. SUTISNA, S.H
12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H

Susunan Majelis April Tahun 2019 :

Ketua HARYANTO, S.H.,.M.H
Wk. Ketua SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H
Hakim Anggota
1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH..
2. DORTIANNA PARDEDE, SH.,M.H
3. SITI FARIDA MT, SH.,MH
4. M. NURZAMAN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti :

Susunan Majelis Nopember Tahun 2019 :

Ketua HARYANTO, S.H.,.M.H
Wk. Ketua SUDIYATNO,S.H.,M.H

Hakim Tinggi :

1	DORTIANNA PARDEDE, SH.,MH	NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si
2	HARTADI MT, SH.,MH	1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
3	MUHAMMAD NURZAMAN, SH.,M.	2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.
4	Ny. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H	3. Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.
5	SUBACHRAN HARDI MULYONO,	4. IDHAM CHOLIQ, S.H.
6	HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH	5. WILAN WITARSIH, S.H.
7	SOLAHUDDIN, SH.,MH	6. SITI SUSILAWATI, S.H.
8	VIKTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,M.	7. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
9	H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH	8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
10	POSMAN BAKARA, SH	9. PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.
		10. IDRIS AWALUDDIN, SH
		11. SUTISNA, S.H
		12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H
		13. BASRIDA MURNI, SH
		14. TRI WIDODO, SH
		15. UDING SAEFUDIN, SH
		16. NUR FU'AD, SH

Rekapitulasi :

1. Sisa Tahun 2018	:	0 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2019	:	6 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2019	:	5 Perkara
4. Perkara dicabut	:	0 Perkara
5. Sisa belum dibagi	:	0 Perkara
6. Sisa Sudah dibagi	:	1 Perkara

Mengetahui :
PANITERA MUDA PIDANA

SUNIYANTA, SH.,MH
NIP. 19660608 199203 1 007

Serang, 31 Desember 2019
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN

ARFIANTI,SE.,MH
NIP. 19821218 200904 2 006

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6
SERANG

Formulir LII - B1

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA

BULAN : JANUARI-DESEMBER TAHUN : 2019

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN		
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	100 / PID / 2018 / PT.BTN	C3. C10. C15. D5	21.11.2018	21.11.2018	09.01.2019			
2	103 / PID / 2018 / PT.BTN	C5. C18. C19. D6	27.11.2018	27.11.2018	14.01.2019			
3	104 / PID / 2018 / PT.BTN	C3. C10. C15. D12	29.11.2018	29.11.2018	08.01.2019			
4	105 / PID / 2018 / PT.BTN	C6. C8. C20. D2	10.12.2018	12.12.2018	23.01.2019			
5	106 / PID / 2018 / PT.BTN	C3. C10. C15. D10	10.12.2018	11.12.2018	10.01.2019			
6	107 / PID / 2018 / PT.BTN	C4. C16. C17. D6	10.12.2018	11.12.2018	16.01.2019			
7	108 / PID / 2018 / PT.BTN	C5. C18. C19. D4	10.12.2018	11.12.2018	23.01.2019			
8	109 / PID / 2018 / PT.BTN	C1. C12. C14. D9	10.12.2018	11.12.2018	09.01.2019			
9	110 / PID / 2018 / PT.BTN	C1. C12. C14. D8	14.12.2018	17.12.2018	29.01.2019			
10	111 / PID / 2018 / PT.BTN	C3. C10. C15. D11	14.12.2018	17.12.2018	23.01.2019			
11	1 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C16. C17. D7	02.01.2019	02.01.2019	15.01.2019			
12	2 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C18. C19. D12	02.01.2019	02.01.2019	21.02.2019			
13	3 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C8. C20. D10	02.01.2019	02.01.2019	31.01.2019			
14	4 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C12. C14. D6	02.01.2019	02.01.2019	07.02.2019			
15	5 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C7. C13. D4	02.01.2019	02.01.2019	31.01.2019			
16	6 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C10. C15. D9	04.01.2019	07.01.2019	18.02.2019			
17	7 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C16. C17. D11	04.01.2019	07.01.2019	31.01.2019			
18	8 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C19. C20. D2	04.01.2019	07.01.2019	01.02.2019			
19	9 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C8. C20. D8	07.01.2019	09.01.2019	05.03.2019			
20	10 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C12. C14. D5	07.01.2019	09.01.2019	07.02.2019			
21	11 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C7. C13. D8	28.01.2019	28.01.2019	23.02.2019			
22	12 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C10. C15. D7	28.01.2019	28.01.2019	12.02.2019			
23	13 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C16. C17. D5	30.01.2019	31.01.2019	21.02.2019			
24	14 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C18. C19. D12	07.02.2019	11.02.2019	21.03.2019			
25	15 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C12. C14. D10	18.02.2019	18.02.2019	12.03.2019			
26	16 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C8. C20. D6	18.02.2019	18.02.2019	21.03.2019			
27	17 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C7. C13. D9	18.02.2019	18.02.2019	20.03.2019			
28	18 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C3. C12. D1	20.02.2019	20.02.2019	18.03.2019			
29	19 / PID / 2019 / PT.BTN	C7. C8. C18. D2	6.03.2019	8.03.2019	09.04.2019			
30	20 / PID / 2019 / PT.BTN	C10. C19. C2. D4	6.03.2019	6.03.2019	27.03.2019			
31	21 / PID / 2019 / PT.BTN	C12. C13. C3. D11	06.03.2019	08.03.2019	21.03.2019			
32	22 / PID / 2019 / PT.BTN	C14. C21. C4. D11	14.03.2019	15.03.2019	09.04.2019			
33	23 / PID / 2019 / PT.BTN	C16. C5. C15. D13	21.03.2019	22.03.2019	08.04.2019			
34	24 / PID / 2019 / PT.BTN	C20. C6. C17. D14	21.03.2019	22.03.2019	23.04.2019			
35	25 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C1. C7. D15	21.03.2019	22.03.2019	16.04.2019			
36	26 / PID / 2019 / PT.BTN	C7. C8. C17. D8	04.04.2019	04.04.2019	02.05.2019			
37	27 / PID / 2019 / PT.BTN	C10. C19. C2. D8	04.04.2019	04.04.2019	25.04.2019			
38	28 / PID / 2019 / PT.BTN	C11. C12. C3. D6	04.04.2019	04.04.2019	02.05.2019			
39	29 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C17. C7. D16	16.04.2019	22.04.2019	09.05.2019			
40	30 / PID / 2019 / PT.BTN	C18. C2. C10. D5	22.04.2019	22.04.2019	10.05.2019			
41	31 / PID / 2019 / PT.BTN	C12. C3. C11. D7	22.04.2019	22.04.2019	14.05.2019			
42	32 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C20. C4. D10	22.04.2019	22.04.2019	08.05.2019			
43	33 / PID / 2019 / PT.BTN	C14. C15. C5. D3	26.04.2019	02.05.2019	16.05.2019			

KETERANGAN

Susunan Majelis Bulan Desember Tahun 2018 :

Ketua : Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH., M.Hum. (A)
Wk. Ketua : Dr. H. NARDIMAN, SH., MH. (B)
Hakim Anggota
1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH
3. AMRIDDIN, SH.,MH
4. DANIEL RIMPAN, SH
5. IERSTAF, SH
6. MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.
7. SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.
8. DORTIANA PARDEDE, SH., M.H.
9. T.H. TAMPUBOLON, S.H., M..H.
10. AGUS HERJONO, S.H., M.H.
11. MEGA BOEANA, S.H.
12. SITI FARIDA MT.,S.H.,M.H.
13. HARTADI, S.H ., M.H.
14. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.
15. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,
16. H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H
17. DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.Hum
18. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,.M.Hum
19. MARIANA SONDANG MARSAULINA PANJAITAN,S.H.,M.H
20. M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H

Panitera Pengganti :
NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si
1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M,H.
3. Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.
4. IDHAM CHOLIQ, S.H.
5. WILAN WITARSIH, S.H.
6. SITI SUSILAWATI, S.H.
7. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
9. PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.
10. IDRIS AWALUDDIN, SH
11. SUTISNA, S.H
12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H

Susunan Majelis Bulan Maret Tahun 2019 :

Ketua : HARYANTO, S.H.,M.H (A)
Wakil Ketua : SYAFRULLAH SUMAR., S.H.,.M.H (B)
Hakim Anggota
1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H. (C)
2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH
3. AMRIDDIN, SH.,MH
4. DANIEL RIMPAN, SH
5. IERSYAF, SH
6. MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.
7. SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.
8. DORTIANA PARDEDE, SH., M.H.
9. T.H. TAMPUBOLON, S.H., M..H.
10. AGUS HERJONO, S.H., M.H.
11. MEGA BOEANA, S.H.
12. SITI FARIDA MT.,S.H.,M.H.
13. HARTADI, S.H ., M.H.
14. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.
15. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,
16. H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H
17. DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.Hum
18. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,.M.Hum
19. MARIANA SONDANG MARSAULINA PANJAITAN,S.H.,M.H
20. M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H
21. BUDI HAPSARI, SH.,MH

Panitera Pengganti (D)
Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H., M.H
1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
2. H. TOHIRI BIN ASNGAT, S.H.
3. SUTARNO, S.H., M.H.
4. AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.
5. Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.
6. IDHAM CHOLIQ, S.H.
7. WILAN WITARSIH, S.H.
8. SITI SUSILAWATI, S.H.
9. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
10. YANTO BUDIYANTO, S.H.
11. PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.
12. IDRIS AWALUDDIN, SH

44	34 / PID / 2019 / PT.BTN	C19. C6. C16. D4	02.05.2019	06.05.2019	20.05.2019			
45	35 / PID / 2019 / PT.BTN	C17. C1. C7. D13	02.05.2019	06.05.2019	21.05.2019			
46	36 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C10. C18. D14	02.05.2019	06.05.2019	17.05.2019			
47	37 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D15	02.05.2019	06.05.2019	20.05.2019			
48	38 / PID / 2019 / PT.BTN	C20. C4. C13. D9	03.05.2019	06.05.2019	23.05.2019			
49	39 / PID / 2019 / PT.BTN	C15. C5. C14. D16	03.05.2019	06.05.2019	22.05.2019			
50	40 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C7. C8. D8	03.05.2019	06.05.2019	21.05.2019			
51	41 / PID / 2019 / PT.BTN	C10. C18. C2. D11	09.05.2019	09.05.2019	22.05.2019			
52	42 / PID / 2019 / PT.BTN	C11. C12. C3. D5	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019			
53	43 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C13. C20. D2	14.05.2019	15.05.2019	27.05.2019			
54	44 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C14. C15. D5	15.05.2019	15.05.2019	11.06.2019			
55	45 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C16. C19. D7	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019			
56	46 / PID / 2025 / PT.BTN	C7. C8. C17. D9	17.05.2019	17.05.2019	27.05.2019			
57	47 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C17. C1. D15	17.05.2019	17.05.2019	28.05.2019			
58	48 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C6. C16. D13	17.05.2019	17.05.2019	18.06.2019			
59	49 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C11. C12. D1	17.05.2019	17.05.2019	19.06.2019			
60	50 / PID / 2019 / PT.BTN	C18. C2. C10. D16	22.5.2019	22.05.2019	31.05.2019			
61	51 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C3. C12. D10	27.05.2019	27.05.2019	20.06.2019			
62	52 / PID / 2019 / PT.BTN	C20. C4. C13. D4	27.05.2019	27.05.2019	18.06.2019			
63	53 / PID / 2019 / PT.BTN	C14. C5. C15. D3	27.05.2019	27.05.2019	18.06.2019			
64	54 / PID / 2019 / PT.BTN	C16. C19. C6. D14	27.05.2019	27.05.2019	19.06.2019			
65	55 / PID / 2019 / PT.BTN	C17. C7. C8. D7	27.05.2019	27.05.2019	19.06.2019			
66	56 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C7. C8. D11	27.05.2019	27.05.2019	20.06.2019			
67	57 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C10. C18. D11	12.06.2019	12.06.2019	25.06.2019			
68	58 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D10	12.06.2019	12.06.2019	04.07.2019			
69	59 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C20. C4. D8	12.06.2019	12.06.2019	11.07.2019			
70	60 / PID / 2019 / PT.BTN	C7. C21. C22. D13	17.06.2019	17.06.2019	03.07.2019			
71	61 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C23. C24. D6	17.06.2019	17.06.2019	09.07.2019			
72	62 / PID / 2019 / PT.BTN	C17. C22. C1. D7	21.06.2019	24.06.2019	11.07.2019			
73	63 / PID / 2019 / PT.BTN	C23. C24. C8. D15	01.07.2019	02.07.2019	25.07.2019			
74	64 / PID / 2019 / PT.BTN	C24. C8. C23. D9	01.07.2019	02.07.2019	26.07.2019			
75	65 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C17. C22. D8	03.07.2019	03.07.2019	25.07.2019			
76	66 / PID / 2019 / PT.BTN	C10. C18. B2. D5	08.07.2019	09.07.2019	25.07.2019			
77	67 / PID / 2019 / PT.BTN	C21. C22. C23. D14	17.07.2019	17.07.2049	25.07.2019			
78	68 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C23. C21. D16	17.07.2019	17.07.2019	25.07.2019			
79	69 / PID / 2019 / PT.BTN	C23. C22. C21. D11	17.07.2019	17.07.2019	25.07.2019			
80	70 / PID / 2019 / PT.BTN	C15. C5. C14. D13	18.07.2019	18.07.2019	31.07.2019			
81	71 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C15. C13. D5	23.07.2019	23.07.2019	05.08.2019			
82	72 / PID / 2019 / PT.BTN	C12. C3. C11. D13	02.08.2019	05.08.2019	29.08.2019			
83	73 / PID / 2019 / PT.BTN	C22. C1. C17. D15	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019			
84	74 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C15. C23. D10	12.08.2019	13.08.2019	28.08.2019			
85	75 / PID / 2019 / PT.BTN	C22. C1. C17. D9	19.08.2019	20.08.2019	11.09.2019			
86	76 / PID / 2019 / PT.BTN	C18. C2. C10. D7	19.08.2019	20.08.2019	04.09.2019			
87	77 / PID / 2019 / PT.BTN	C11. C12. C3. D11	19.08.2019	20.08.2019	12.09.2019			
88	78 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C20. C4. D5	22.08.2019	26.08.2019	11.09.2019			
89	79 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C15. C7. D14	22.08.2019	26.08.2019	05.09.2019			
90	80 / PID / 2019 / PT.BTN	C19. C6. C16. D11	27.08.2019	27.08.2019	05.09.2019			
91	81 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C14. C15. D8	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019			
92	82 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C13. C20. D13	11.09.2019	11.09.2019	01.10.2019			
93	83 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D16	17.09.2019	17.09.2019	26.09.2019			
94	84 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D9	17.09.2019	17.09.2019	26.09.2019			
95	85 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D2	23.09.2019	24.09.2019	15.10.2019			
96	86 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C17.0 C22. D4	23.09.2019	24.09.2019	24.10.2019			

Susunan Majelis Bulan April Tahun 2019 :

Ketua	: HARYANTO, S.H.,M.H	**(A)**
Wakil Ketua	: SYAFRULLAH SUMAR., S.H.,.M.H	**(B)**
Hakim Anggota	1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.	**(C)**
	2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH	**Panitera Pengganti**
	3. AMRIDDIN, SH.,MH	NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si
	4. DANIEL RIMPAN, SH	1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
	5. IERSYAF, SH	2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M,H.
	6. MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.	3. Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.
	7. SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.	4. IDHAM CHOLIQ, S.H.
	8. DORTIANA PARDEDE, SH., M.H.	5. WILAN WITARSIH, S.H.
	9. T.H. TAMPUBOLON, S.H., M..H.	6. SITI SUSILAWATI, S.H.
	10. AGUS HERJONO, S.H., M.H.	7. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
	11. SITI FARIDA MT.,S.H.,M.H.	8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
	12. HARTADI, S.H ., M.H.	9. PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.
	13. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.	10. IDRIS AWALUDDIN, SH
	14. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,	11. SUTISNA, S.H
	15. H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H	12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H
	16. DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.Hum	13. BASRIDA MURNI, SH
	17. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,.M.Hı	14. TRI WIDODO, SH
	18. MARIANA SONDANG MARSAULINA	15. UDING SAEFUDIN, SH
	19. M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H	16. NUR FU'AD, SH
	20. BUDI HAPSARI, SH.,MH	17. POEDJI RAHARJO, SH

Susunan Majelis Bulan Juni Tahun 2019 :

Ketua	: HARYANTO, S.H.,M.H	**(A)**
Wakil Ketua	: SYAFRULLAH SUMAR., S.H.,.M.H	**(B)**
Hakim Anggota	1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.	**(C)**
	2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH	**Panitera Pengganti**
	3. AMRIDDIN, SH.,MH	NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si
	4. DANIEL RIMPAN, SH	1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
	5. IERSYAF, SH	2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M,H.
	6. MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.	3. POEDJI RAHARJO, SH
	7. SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.	4. CHRISTIANTO PUDJIONO, SH.,MH
	8. DORTIANA PARDEDE, SH., M.H.	5. IDHAM CHOLIQ, SH
	9. T.H. TAMPUBOLON, S.H., M..H.	6. WILAN WITARSIH, S.H.
	10. AGUS HERJONO, S.H., M.H.	7. SITI SUSILAWATI, S.H.
	11. SITI FARIDA MT.,S.H.,M.H.	8. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
	12. HARTADI, S.H ., M.H.	9. YANTO BUDIYANTO, S.H.
	13. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.	10. IDRIS AWALUDDIN, SH
	14. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,	11. SUTISNA, S.H
	15. H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H	12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H
	16. DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.Hum	13. BASRIDA MURNI, SH
	17. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,.M.Hı	14. TRI WIDODO, SH
	18. MARIANA SONDANG MARSAULINA	15. UDING SAEFUDIN, SH
	19. M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H	16. NURFUÁD, SH
	20. BUDI HAPSARI, SH.,MH	
	21. SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.,M.H	
	22. HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,.M.H	
	23. SOLAHUDDIN, SH.,.M.H	
	24. Dr. BINDAR GULTOM,S.H.,S.E.,M.H	

97	87 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C14. C15. D16	01.10.2019	01.10.2019	07.11.2019			
98	88 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C10. C18. D10	01.10.2019	01.10.2019	21.10.2019			
99	89 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C10. C18. D7	09.10.2019	09.10.2019	25.10..2019			
100	90 / PID / 2019 / PT.BTN	C3. C11. C12. D15	10.10.2019	10.10.2019	16.10.2019			
101	91 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C16. C19. D6	10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019			
102	92 / PID / 2019 / PT.BTN	C2. C10. C18. D8	10.10.2019	10.10.2019	28.10.2019			
103	93 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C21. C24. D7	24.10.2019	24.10.2019	18.11.2019			
104	94 / PID / 2019 / PT.BTN	C1. C17.0 C22. D10	24.10.2019	24.10.2019	20.11.2019			
105	95 / PID / 2019 / PT.BTN	C20. C 4. C13. D5	28.10.2019	28.10.2019	19.11.2019			
106	96 / PID / 2019 / PT.BTN	C14. C5. C20. D11	30.10.2019	30.10.2019	19.11.2019			
107	97 / PID / 2019 / PT.BTN	C12. C3. C11. D6	31.10.2019	31.10.2019	19.11.2019			
108	98 / PID / 2019 / PT.BTN	C16. C19. C6. D13	08.11.2019	08.11.2019	09.12.2019			
109	99 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C4. C20. D5	08.11.2019	08.11.2019	02.12.2019			
110	100 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C21. C24. D14	08.11.2019	08.11.2019	03.12.2019			
111	101 / PID / 2019 / PT.BTN	C16. C6. C19. D16	15.11.2019	15.11.2019	19.11.2019			
112	102 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C21. C26. D10	22.11.2019	22.11.2019	12.12.2019			
113	103 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C14. C19. D9	29.11..2019	02.12.2019	12.12.2019			
114	104 / PID / 2019 / PT.BTN	C7. C16. C18. D15	29.11.2019	02.12.2019	17.12.2019			
115	105 / PID / 2019 / PT.BTN	C13. C11. C12. D11	06.12.2019	06.12.2019			105 / PID / 2019 / PT.BTN	
116	106 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C24. C17. D6	06.12.2019	06.12.2019			106 / PID / 2019 / PT.BTN	
117	107 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C3. C19. D14	18.12.2019	18.12.2019			107 / PID / 2019 / PT.BTN	
118	108 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C21. C20. D11	18.12.2019	18.12.2019			108 / PID / 2019 / PT.BTN	
119	109 / PID / 2019 / PT.BTN	B. C21. C20. D9	18.12.2019	18.12.2019			109 / PID / 2019 / PT.BTN	
120	110 / PID / 2019 / PT.BTN	C9. C23. C27. D3	20.12.2019	20.12.2019			110 / PID / 2019 / PT.BTN	
121	111 / PID / 2019 / PT.BTN	C8. C21. C26. D1	20.12.2019	20.12.2019			111 / PID / 2019 / PT.BTN	
122	112 / PID / 2019 / PT.BTN	C5. C24. C17. D13	20.12.2019	20.12.2019			112 / PID / 2019 / PT.BTN	
123	113 / PID / 2019 / PT.BTN	C7. C16. C18. D2	20.12.2019	20.12.2019			113 / PID / 2019 / PT.BTN	
124	114 / PID / 2019 / PT.BTN	C6. C25. C22. D14	20.12.2019	20.12.2019			114 / PID / 2019 / PT.BTN	
125	115 / PID / 2019 / PT.BTN	C4. C14. C19. D6	20.12.2019	20.12.2019			115 / PID / 2019 / PT.BTN	

Susunan Majelis Bulan Nopember Tahun 2019 :

Ketua : HARYANTO, S.H.,M.H

Wakil Ketua : SUDIYATNO, S.H.,M.H

Hakim Anggota

1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
2. BENAR KARO-KARO,SH.,MH
3. AMRIDDIN, SH.,MH
4. DANIEL RIMPAN, SH
5. IERSYAF, SH
6. MASRUDDIN CANIAGO, S.H., M.H.
7. KUSRIYANTO, S.H., M.Hum
8. DORTIANA PARDEDE, SH., M.H.
9. SITI FARIDA MT.,S.H.,M.H.
10. HARTADI, S.H ., M.H.
11. POSMAN BAKARA, SH.,MH
12. MUHAMMAD NURZAMAN, S.H.,.M.H
13. H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.
14. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,
15. H. FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H
16. DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.Hum
17. ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH
18. MARIANA SONDANG MARSAULINA
19. M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H
20. BUDI HAPSARI, SH.,MH
21. SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.,M.H
22. HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,.M.H
23. SOLAHUDDIN, SH.,.M.H
24. Dr. BINSAR GULTOM,S.H.,S.E.,M.H
25. UMBU JAMA,S.H.,M.H
26. H. SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H
27. VICTOR SELAMAT ZAGOTO,S.H.,M.Hum

(C)

Panitera Pengganti

NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si

1. H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
2. AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M,H.
3. POEDJI RAHARJO, SH
4. CHRISTIANTO PUDJIONO, SH.,MH
5. IDHAM CHOLIQ, SH
6. WILAN WITARSIH, S.H.
7. SITI SUSILAWATI, S.H.
8. ITAIDA LAMTIUR P, S.H.
9. YANTO BUDIYANTO, S.H.
10. IDRIS AWALUDDIN, SH
11. SUTISNA, S.H
12. CHISTANTO PUDJIONO, S.H.,M.H
13. BASRIDA MURNI, SH
14. TRI WIDODO, SH
15. UDING SAEFUDIN, SH
16. NURFUÁD, SH

Rekapitulasi :

1. Sisa Tahun 2018	:	10 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2019	:	115 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2019	:	114 Perkara
4. Perkara dicabut	:	0 Perkara
5. Sisa belum dibagi	:	0 Perkara
6. Sisa Sudah dibagi	:	11 Perkara

Mengetahui :
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUNIYANTA, S.H.,M.H
NIP. 19660608 199203 1 007

Serang, 31 Desember 2019
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN

ARFIANTI, S.E.,M.H
NIP. 19821218 200904 2 006

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6
S E R A N G

Formulir LII - B1

LAPORAN TAHUNAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2019

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sisa Tahun 2018								**Susunan Majelis Hakim :**
1	12/PID.SUS-TPK/2018/PT.BTN (L1)	B1.C5.C6.D5	26.11.2018	27.11.2018	3.1.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 7.1.2019	Ketua : DR.HJ.SRI SUTATIEK, S.H.,M.H. (A1) H. HARYANTO, S.H.,M.H. (A2)
	Tahun 2019								
2	1/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	C1.C4.C5.D9	20.09.2019	24.09.2019	06.11.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 8.11.2019	Wakil Ketua : : DR.H.NARDIMAN, S.H.,M.H. (B1) SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H. (B2) SUDIYATNO, S.H.,M.H. (B3)
3	2/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	C1.C4.C5.D14	23. 09. 2019	24.09.2019	06.11.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 8.11.2019	
4	3/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	B3.C4.C5.D8	18.11.2019	19.11.2019	17.12.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 17.12.2019	Hakim Anggota : 1. ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H. (C) 2. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H. 3. AGUS HERJONO, S.H. 4. IERSYAF, S.H. 5. DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,C.N. 6. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.
5	4/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	B3.C4.C5.D4	27.11.2019	29.11.2019	19.12.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 19.12.2019	
6	5/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	B3.C4.C5.D13	27.11.2019	29.11.2019	19.12.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 19.12.2019	Panitera Pengganti : NETTI SRININGSIH, S.H.,M.Si. (D) 1. H. SUNIYANTA, S.H.,M.H. 2. POEDJI RAHARDJO, S.H. 3. AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H. 4. CHRISTANTO PUJIONO, S.H.,M.H. 5. IDHAM CHOLIQ, S.H. 6. IDRIS AWALUDDIN, S.H.,M.H. 7. ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H. 8. WILAN WITARSIH, S.H.,M.H. 9. YANTO BUDIYANTO, S.H. 10. SUTISNA, S.H. 11. SITI SUSILAWATI, S.H. 12. BASRIDA MURNI, S.H. 13. TRI WIDODO, S.H.,M.H. 14. UDING SAEFUDIN, S.H.
7	6/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	B3.C4.C6.D12	27.11.2019	29.11.2019	19.12.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 19.12.2019	
8	7/PID.SUS-TPK/2019/PT.BTN (L1)	B3.C4.C6.D5	27.11.2019	29.11.2019	19.12.2019 (Menguatkan)			Minutasi tanggal : 19.12.2019	

REKAPITULASI :

1. Sisa Tahun 2018	:	1 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2019	:	7 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2019	:	8 Perkara
4. Sisa belum dibagi	:	- Perkara
5. Sisa sudah dibagi	:	- Perkara
6. Sisa sudah dibagi	:	- Perkara

Mengetahui :
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS TIPIKOR

AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.
NIP. 19730601 200012 1 001

Serang, 31 Desember 2019
PEMBUAT LAPORAN TAHUNAN

SITI KHOIRUN NISA, S.H.

Dashboard

STATISTIK PERKARA TK BANDING

Statistik Penanganan Perkara (Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara & Waktu Tertentu).

PILIH PERIODE YANG DITAMPILKAN

01/01/2019 s.d 31/12/2019 | Tampilkan! | Kembali

Perdata

RASIO PENANGANAN PERKARA 88%

1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	295
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	31
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	160
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	168
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	23

Pidana Biasa

RASIO PENANGANAN PERKARA 91%

1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	132
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	10
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	115
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	114
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	11

Pidana Tipikor

RASIO PENANGANAN PERKARA 100%

1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	8
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	1
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	7
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	8
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	-

Pidana Khusus Anak

RASIO PENANGANAN PERKARA 83%

1	Belum Proses Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	7
2	Sisa Perkara Sampai Dengan Tanggal 01.01.2020	-
3	Masuk Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	6
4	Putus Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	5
5	Sisa Akhir Perkara Sampai Dengan Tanggal 31.12.2019	1

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	554	102	118	39	3	538
2	Permohonan	94	99	98	76	0	95
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	24	1	2	1	0	23
9	Permohonan Konsinyasi	0	8	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	766	181	290	63	0	657
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	9350	9350	9350	0	316
14	Pidana Anak	17	6	5	0	0	18
15	Pidana Praperadilan	4	0	2	2	0	2
						Total	1660

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Februari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	538	98	76	19	2	560
2	Permohonan	95	104	106	73	0	93
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	23	1	1	0	0	23
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	657	250	211	22	2	696
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	1482	1482	1482	0	316
14	Pidana Anak	18	5	7	0	0	16
15	Pidana Praperadilan	2	0	0	0	0	2
						Total	1717

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Maret 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	560	108	100	22	9	568
2	Permohonan	93	107	95	64	0	105
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	23	9	0	0	0	32
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	696	203	217	24	0	682
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	0	0	0	0	316
14	Pidana Anak	16	8	3	0	0	21
15	Pidana Praperadilan	2	6	0	0	0	8
						Total	1743

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	568	91	99	22	10	560
2	Permohonan	105	91	111	64	0	85
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	32	1	8	4	0	25
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	682	235	226	33	3	691
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	2527	2527	2527	0	316
14	Pidana Anak	21	3	8	2	0	16
15	Pidana Praperadilan	8	6	7	4	0	7
						Total	1711

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Mei 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	560	112	111	28	2	561
2	Permohonan	85	101	113	59	1	73
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	25	0	3	1	0	22
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	691	234	279	57	1	646
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	8112	8112	8112	0	316
14	Pidana Anak	16	7	7	0	0	16
15	Pidana Praperadilan	7	0	4	2	0	3
						Total	1648

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juni 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	561	59	50	4	0	570
2	Permohonan	73	57	42	19	0	88
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	22	4	3	1	0	23
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	646	83	118	20	0	611
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	5461	5461	5461	0	316
14	Pidana Anak	16	2	1	0	0	17
15	Pidana Praperadilan	3	1	1	0	0	3
						Total	1639

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juli 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	570	134	102	30	16	602
2	Permohonan	88	111	103	58	0	96
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	23	1	0	0	0	24
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	611	214	245	101	4	580
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	12704	12704	12704	0	316
14	Pidana Anak	17	6	5	2	0	18
15	Pidana Praperadilan	3	3	3	1	0	3
						Total	1650

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Agustus 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	602	115	119	50	7	598
2	Permohonan	96	95	96	79	0	95
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	24	12	9	5	0	27
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	580	164	171	83	10	573
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	15304	15304	15304	0	316
14	Pidana Anak	18	6	5	1	0	19
15	Pidana Praperadilan	3	0	1	1	0	2
						Total	1641

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : September 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	598	117	107	37	13	608
2	Permohonan	95	104	108	88	3	91
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	27	7	6	6	0	28
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	573	182	155	73	9	600
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	22323	22323	22323	0	316
14	Pidana Anak	19	7	6	3	0	20
15	Pidana Praperadilan	2	0	0	0	0	2
						Total	1676

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Oktober 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	608	131	102	47	16	637
2	Permohonan	91	135	127	108	1	99
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	28	5	7	4	0	26
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	600	255	195	102	28	660
11	Pidana Singkat	0	1	1	1	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	15085	15085	15085	0	316
14	Pidana Anak	20	8	7	0	1	21
15	Pidana Praperadilan	2	0	0	0	0	2
						Total	1772

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : November 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	637	84	94	37	29	627
2	Permohonan	99	122	118	86	6	103
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	0	0	0	0	3
8	Gugatan Sederhana	26	1	4	2	2	23
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	660	258	176	70	36	742
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	18650	18650	18650	0	316
14	Pidana Anak	21	1	4	1	1	18
15	Pidana Praperadilan	2	2	0	0	0	4
						Total	1844

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Desember 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	627	87	78	34	36	636
2	Permohonan	103	98	83	72	7	118
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	3	2	0	0	0	5
8	Gugatan Sederhana	23	4	1	0	0	26
9	Permohonan Konsinyasi	8	0	0	0	0	8
10	Pidana Biasa	742	318	170	58	80	890
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	316	7377	7377	7377	0	316
14	Pidana Anak	18	4	4	1	3	18
15	Pidana Praperadilan	4	0	2	1	1	2
						Total	2019

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	47	10	14	6	0	43
2	Permohonan	9	37	27	20	0	19
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	35	16	16	2	0	35
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	10	2	12	10	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	225	68	130	77	0	163
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	5328	4184	4184	0	1144
14	Tindak Pidana Korupsi	7	0	2	2	0	5
15	Pidana Anak	9	2	1	1	0	10
16	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	0
						Total	1419

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Februari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	43	11	15	4	0	39
2	Permohonan	19	27	31	18	0	15
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	35	12	11	3	0	36
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	2	0	0	0	2
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	163	84	90	52	0	157
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	2	2	2	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	1144	7562	7292	7292	0	1414
14	Tindak Pidana Korupsi	5	3	1	0	0	7
15	Pidana Anak	10	4	4	2	0	10
16	Pidana Praperadilan	0	1	0	0	0	1
						Total	1681

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Maret 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	39	8	7	3	0	40
2	Permohonan	15	28	32	23	0	11
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	36	16	7	2	0	45
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	2	1	1	1	0	2
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	157	72	62	32	0	167
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	1414	5430	6844	6844	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	7	2	1	0	0	8
15	Pidana Anak	10	3	3	2	0	10
16	Pidana Praperadilan	1	1	1	0	0	1
						Total	284

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	40	8	15	7	0	33
2	Permohonan	11	14	16	14	1	9
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	18	12	4	0	51
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	2	4	3	1	0	3
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	167	72	79	44	0	160
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	4104	3664	3664	0	440
14	Tindak Pidana Korupsi	8	0	0	0	0	8
15	Pidana Anak	10	4	5	2	0	9
16	Pidana Praperadilan	1	1	1	1	0	1
						Total	714

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Mei 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	33	15	8	4	0	40
2	Permohonan	9	8	14	11	1	3
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	51	9	10	1	0	50
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	3	3	4	3	0	2
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	160	100	99	49	0	161
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	440	2789	3229	3229	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	8	8	3	0	0	13
15	Pidana Anak	9	1	2	2	0	8
16	Pidana Praperadilan	1	2	2	0	0	1
						Total	278

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juni 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	40	8	8	2	0	40
2	Permohonan	3	12	4	3	0	11
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	50	9	10	2	1	49
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	2	0	2	1	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	161	27	45	21	5	143
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	1756	1756	1756	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	13	0	3	0	0	10
15	Pidana Anak	8	0	0	0	0	8
16	Pidana Praperadilan	1	0	1	0	1	0
						Total	261

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juli 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	40	18	7	1	1	51
2	Permohonan	11	17	21	14	0	7
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	49	15	21	4	1	43
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	7	0	0	0	7
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	143	87	86	22	0	144
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	731	731	731	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	10	5	2	0	0	13
15	Pidana Anak	8	4	2	2	0	10
16	Pidana Praperadilan	0	1	0	0	0	1
						Total	276

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Agustus 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	51	18	11	5	0	58
2	Permohonan	7	17	13	7	1	11
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	43	11	20	2	0	34
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	7	0	6	3	0	1
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	144	53	74	36	1	123
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	13	0	0	0	0	13
15	Pidana Anak	10	2	3	1	0	9
16	Pidana Praperadilan	1	2	1	0	0	2
						Total	251

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : September 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	58	8	18	8	1	48
2	Permohonan	11	19	17	14	0	13
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	34	13	4	0	1	43
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	1	2	0	0	0	3
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	123	63	57	31	3	129
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	3	3	3	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	13	5	2	2	0	16
15	Pidana Anak	9	5	1	0	1	13
16	Pidana Praperadilan	2	0	2	2	0	0
						Total	265

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Oktober 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	48	20	20	10	1	48
2	Permohonan	13	30	33	25	1	10
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	43	12	15	4	1	40
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	1	0	0	0	1
8	Gugatan Sederhana	3	3	0	0	0	6
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	129	102	71	37	7	160
11	Pidana Singkat	0	1	1	1	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	16	1	8	1	0	9
15	Pidana Anak	13	7	6	3	0	14
16	Pidana Praperadilan	0	1	0	0	0	1
						Total	289

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : November 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	48	13	13	3	1	48
2	Permohonan	10	21	21	14	0	10
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	40	5	5	1	3	40
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	1	0	0	0	0	1
8	Gugatan Sederhana	6	2	6	5	0	2
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	160	91	51	24	3	200
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	4	4	4	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0	0	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	9	2	1	0	0	10
15	Pidana Anak	14	4	5	3	0	13
16	Pidana Praperadilan	1	0	1	1	0	0
						Total	324

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Desember 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	48	8	9	5	1	47
2	Permohonan	10	18	15	12	2	13
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	40	8	5	1	4	43
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	1	0	0	0	0	1
8	Gugatan Sederhana	2	5	1	0	1	6
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	200	115	69	38	11	246
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	2	2	2	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	2049	2049	2049	0	0
14	Tindak Pidana Korupsi	10	1	0	0	0	11
15	Pidana Anak	13	1	4	2	0	10
16	Pidana Praperadilan	0	1	0	0	0	1
						Total	378

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	10	3	1	1	0	12
2	Permohonan	1	3	4	4	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	43	22	41	41	0	24
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	183	125	125	0	58
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	1	0	1	1	0	0
						Total	100

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Februari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	12	2	3	3	0	11
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	24	24	20	20	0	28
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	58	487	518	518	0	27
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	72

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Maret 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	11	5	6	6	0	10
2	Permohonan	0	4	2	2	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	1	1	1	0	0
9	Pidana Biasa	28	10	17	17	0	21
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	27	484	511	511	0	0
13	Pidana Anak	6	1	0	0	0	7
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	40

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	10	3	4	4	0	9
2	Permohonan	2	0	2	2	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	21	25	19	18	0	27
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	285	263	263	0	22
13	Pidana Anak	7	0	1	1	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	64

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Mei 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	9	0	1	1	0	8
2	Permohonan	0	1	1	1	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	27	24	32	32	0	19
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	22	380	402	402	0	0
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	33

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juni 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	8	0	0	0	0	8
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	19	13	15	15	0	17
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	2	2	2	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	175	175	175	0	0
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	31

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juli 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	8	6	2	2	0	12
2	Permohonan	0	2	2	2	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	13	5	5	0	8
9	Pidana Biasa	17	16	16	16	0	17
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	4	4	4	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	446	369	369	0	77
13	Pidana Anak	6	1	1	1	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	120

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Agustus 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	12	3	2	2	0	13
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	8	0	8	8	0	0
9	Pidana Biasa	17	20	16	16	0	21
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	77	446	523	523	0	0
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	40

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : September 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	13	4	5	5	0	12
2	Permohonan	0	1	1	1	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	13	0	0	0	13
9	Pidana Biasa	21	19	14	14	0	26
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	1613	1613	1613	0	0
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	57

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Oktober 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	12	2	5	4	0	9
2	Permohonan	0	4	2	2	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	13	0	13	13	0	0
9	Pidana Biasa	26	29	21	19	0	34
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	1300	1152	1152	0	148
13	Pidana Anak	6	2	2	2	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	199

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : November 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	9	0	2	2	0	7
2	Permohonan	2	1	3	3	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	34	17	38	38	0	13
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	2	2	2	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	148	2095	2243	2243	0	0
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	26

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Desember 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	7	2	2	2	0	7
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pidana Biasa	13	37	15	15	0	35
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	0	3	3	3	0	0
12	Perkara Lalu-Lintas	0	346	130	130	0	216
13	Pidana Anak	6	0	0	0	0	6
14	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	264

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	5	3	1	1	0	7
2	Permohonan	2	5	6	6	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	1	0	0	0	1
10	Pidana Biasa	25	27	17	17	0	35
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	420	420	420	0	0
14	Pidana Anak	0	1	0	0	0	1
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	45

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Februari 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	7	2	1	0	0	8
2	Permohonan	1	5	4	4	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	1	0	0	0	0	1
10	Pidana Biasa	35	2	15	15	0	22
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	663	663	663	0	0
14	Pidana Anak	1	1	1	1	0	1
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	34

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Maret 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	8	2	1	1	0	9
2	Permohonan	2	5	4	4	0	3
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	1	0	1	1	0	0
10	Pidana Biasa	22	24	14	14	0	32
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	487	487	487	0	0
14	Pidana Anak	1	0	1	1	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	44

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	9	3	1	1	0	11
2	Permohonan	3	5	7	6	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	32	16	11	11	0	37
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	162	162	162	0	0
14	Pidana Anak	0	2	1	1	0	1
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	50

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Mei 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	11	3	1	1	0	13
2	Permohonan	1	6	4	4	0	3
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	1	1	1	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	37	17	30	30	0	24
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	805	805	805	0	0
14	Pidana Anak	1	0	1	1	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	40

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juni 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	13	0	0	0	0	13
2	Permohonan	3	10	4	4	0	9
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	24	10	14	14	0	20
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	448	448	448	0	0
14	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	42

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juli 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	13	0	3	2	0	10
2	Permohonan	9	24	26	26	0	7
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	1	1	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	20	4	15	15	0	9
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	507	507	507	0	0
14	Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	26

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Agustus 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	10	2	5	5	0	7
2	Permohonan	7	10	15	15	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	9	10	10	10	0	9
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	2264	2264	2264	0	0
14	Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	18

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : September 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	7	1	3	3	0	5
2	Permohonan	2	11	8	8	0	5
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	9	17	6	6	0	20
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	4303	4303	4303	0	0
14	Pidana Anak	0	2	0	0	0	2
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	32

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Oktober 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	5	0	1	1	0	4
2	Permohonan	5	10	14	14	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	20	11	18	18	0	13
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	2149	2149	2149	0	0
14	Pidana Anak	2	3	5	5	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	18

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : November 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	4	1	2	2	0	3
2	Permohonan	1	8	7	7	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	13	11	9	9	0	15
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	5314	5314	5314	0	0
14	Pidana Anak	0	4	0	0	0	4
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	24

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2019

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Desember 2019

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Gugatan	3	0	1	1	0	2
2	Permohonan	2	4	5	5	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	Pidana Biasa	15	24	7	7	0	32
11	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
12	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
13	Perkara Lalu-Lintas	0	2394	2394	2394	0	0
14	Pidana Anak	4	0	4	4	0	0
15	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
						Total	35

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/67 /KPT/SK/KP.10.01/VII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT) BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang :

a. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;

b. Bahwa untuk kelancaran program tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim, dan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penjaminan Mutu dimaksud ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2004, terkahir telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI BANTEN.

Pertama : Menunjuk dan menempatkan Hakim Tinggi dan Pejabat Struktural yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten ;

Kedua : Tugas Tim adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan program dimaksud serta membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang
Tanggal 12 Juli 2019

KETUA

HARYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;

LAMPIRAN **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN**
Nomor : W.29.U/ 67 /KPT/SK/KP.10.01/VII/2019
Tanggal : 12 Juli 2019

TIM PENJAMNINAN MUTU PENGADILAN TINGGI BANTEN

KETUA TIM : H. HARYANTO, S.H., M.H.
(KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN)

QUALITY MANAGER RESPENTATIVE (QMR) : SYAFRULLAH SUMAR, S.H., M.H.
(WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN)

KOORDINATOR TEHNIK : NETTI SRININGSIH, S.H., M.Si.
(PANITERA PENGADILAN TINGGI BANTEN)

ANGGOTA :

- POEDJI RAHARDJO, S.H.
- H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
- CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H.
- AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.

KOORDINATOR OPERASIONAL : RIDARTO, S.H., M.Si.
(SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN)

ANGGOTA :

- TEGUH BERNOWO, SH., M.H.
- NEVI MUGIA SANTOSA, S.E., M.Si.
- HERRY SETIYAWAN, S.T.
- SRI DIAN GUNARSIH, S.E., Ak.
- Drs. IDRIS PASLUNI
- NURFITRI, S.Kom.

KOORDINATOR DOCUMENT CONTROL :
- TEGUH BERNOWO, S.H., M.H.
(KABAG UMUM DAN KEUANGAN)
- NEVI MUGIA SANTOSA, S.E., M.Si.
(KABAG PERENCANAAN DAN IT)

ANGGOTA :

- SATRIA ARI WIBOWO, A.Md (Staf Pidana)
- TUTI ALAWIYAH (Staf Perdata)
- ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom. (Staf Hukum)
- SITI KHOIRUNNISA (Staf Tipikor)
- MASURI, S.E. (Staf Keuangan)
- RITA HERMINA TAMARA, S.E. (Staf Kepegawaian & IT)
- ROBI, S.H. (Staf TU&RT)
- WIDAYAKA P. ARISTYA, S.Kom. (Staf Kepegawaian & TI)
- YENNI YULIYANI, S.E. (Staf RPA)

SEKRETARIS TAPM : NINIK FAUJIAH, S.Sos.

KOORDINATOR SURVEY PELANGGAN : DR. WAHIDIN, S.H., M.Hum

ANGGOTA :

- CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H.
- ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
- SITI HINDASYAH, S.H., M.H.
- TUTI ALAWIYAH ASRORI, S.E.
- FEBRY CITRA KRISNA SHANTY

ASISTEN/ASESOR :

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.
BENAR KARO KARO, S.H., M.H.
AMRIDDIN, S.H., M.H.
DANIEL RIMPAN, S.H.
IERSYAF, S.H.
MASRUDDIN CANIAGO, S.H.
SHARI DJATMIKO, S.H., M.H.
DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.
AGUS HERJONO, S.H.
SITI FARIDA M.T., S.H., M.H.
HARTADI, S.H., M.H.
H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.
ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H.
H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.
SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.
SOLAHUDDIN, S.H., M.H.
BUDI HAPSARI, S.H., M.H.
MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.
H. M.CH SJAMTRI ENDI, S.H.
HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.
MARIANA SONDANG M. PANJAITAN, S.H., M.H.
DR. BINSAR GULTOM, S.H., S.E., M.H.
DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H., M.H., CN.
EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.

KETUA

HARYANTO

PENGADILAN TINGGI BANTEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR W29.U/ 102 /KPT/SK/KP.04.5/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang :

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dar Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pengadilan sebegai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemnberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum utama adalah:

a. Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Banten;
b. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Banten;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten.

KETIGA : Dengan dikeluarkanya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor W29.U/26/KPT/SK/KP.04.5/III/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan ini sewaktu-waktu dapat dirubah sesuai dengan kepentingan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Desember 2019
KETUA

HARYANTO, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/102 /KPT/SK/KP.04.5/XII/2019
TANGGAL : 5 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Sekretaris : 1. Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten

Anggota Tim Penilai Internal (TPI)

1. Albert M. Siringoringo, S,H., M.H.
2. Dr. Wahidin, S.H., M.Hum.
3. Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.
4. Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.
5. Teguh Bernowo, S.H., M.H.
6. Poedji Rahardjo, S.H.
7. Widayaka Putra Aristya, S.Kom.
8. Ninik Fujiah, S.Sos.

Anggota Tim Unit Penggerak

1. Amriddin, S.H., M.H.
2. Kusriyanto, S.H., M.Hum.
3. Siti Farida, S.H., M.H.
4. Budi Hapsari, S.H., M.H.
5. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
6. Suniyanta, S.H., M.H.
7. Aif Saifudaullah, S.H., M.H.S
8. Herry Setiyawan, S.T.
9. Nurfitri, S.Kom.
10. Satria Ari Wibowo, A.Md.

Anggota Tim Unit Pembangunan

1. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.
2. Mariana Sondang M Panjaitan, S.H., M.H.
3. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
4. Nevi Mugia Santosa, S.E., M.Si.
5. Sri Dian Gunarsih, S.E., Ak.
6. Cristanto Pudjiono, S.H., M.H.
7. Tuti Alawiyah, S.E.

KETUA

HARYANTO, S.H., M.H.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/102 /KPT/SK/KP.04.5/XII/2019
TANGGAL : 5 Desember 2019

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

PEMBINA	HARYANTO, S.H., M.H.
KETUA TIM	SUDIYATNO, S.H., M.H.
KOORDINATOR TEKNIS	POEDJI RAHARDJO, S.H.
KOORDINATOR OPERASIONAL	RIDARTO, S.H., M.Si.

AREA	MATERI	NAMA TIM
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Dr. Wahidin, S.H., M.Hum. (Koodinator) 2. Erlin Hermanto, S.H., M.H. 3. Umbu Jama, S.H. 4. Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. 5. Suniyanta, S.H., M.H. 6. Arfianti, S.E., M.H. 7. Rita Safitri, S.H. 8. Febry Citra K Shanty 9. Ninik Faujiah, S.Sos. 10.Pribadi Hutomo Putro, S.Kom.
II.	PENATAAN TATALAKSANA	1. Albert M. Siringoringo, S.H., M.H. (Koordinator) 2. H. Masruddin Caniago, S.H., M.H. 3. Hartadi, S.H., M.H. 4. Posman Bakara, S.H., M.H. 5. Drs. Idris Pasluni 6. Sutisna, S.H. 7. Itaida L Pangaribuan, S.H. 8. Indra Bayu Segoro, S.Kom. 9. Riky Andrianto, S.E. 10.Tuti Alawiyah, S.E. 11.Surahman Firdaus
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1. Iersyaf, S.H. (Koordinator) 2. Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. 3. M. CH Sjamtri Endi, S.H., M.H. 4. Mariana S.M. Panjaitan, S.H., M.H. 5. Dermawan S Djamian, S.H., M.H., C.N. 6. Nevi Mugia Santosa, S.E., M.Si. 7. Herry Setiyawan, S.T. 8. Rita Hermina Tamara, S.E. 9. Widayaka Putra Aristya, S.Kom. 10.Hadi Subakti
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	1. Benar Karo Karo, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Dortianna Pardede, S.H., M.H. 3. Siti Farida M.T., S.H., M.H. 4. Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. 5. Aif Saifudallah, S.H., M.H. 6. Sri Dian Gunarsih, S.H., Ak.

		7. Siti Hindasyah, S.H., M.H. 8. Yeni Yuliani, S.E. 9. Siti Khoirun nisa, S.H.
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	1. Kusriyanto, S.H., M.Hum. (Koordinator) 2. Solahuddin, S.H., M.H. 3. Budi Hapsari, S.H., M.H. 4. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H. 5. Nurfitri, S.Kom. 6. Idris Awaluddin, S.H., M.H. 7. Hayatul Jannah, S.Hi. 8. Ucu Supriatna, S.H. 9. Masuri, S.E. 10. Ria Anggraeni, S.E.
VI.	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	1. Daniel Rimpan, S.H. (Koordinator) 2. Amriddin, S.H., M.H. 3. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.Si. 4. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. 5. Teguh Bernowo, S.H., M.H. 6. Cristanto Pudjiono, S.H., M.H. 7. Wilan Witarsih, S.Ip,. S.H. 8. Satria Ari Wibowo, A.Md. 9. Dwi Anthony Saputra, S.Kom. 10. Robi, S.H.

KETUA

HARYANTO, S.H., M.H.